

**PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH SYAR'YAH SIGLI DAN
PENGADILAN AGAMA BANJARBARU TENTANG KEWARISAN ANAK
PEREMPUAN BERSAMA SAUDARA
(Pendekatan Komparatif Putusan Nomor
46/Pdt.P/2013/MS.Sgidan90/Pdt.P/2017/PA.Bjb)**

SKRIPSI

Oleh:

ARIF RAHMAN HAKIM

15210125



**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2020**

**PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH SYAR'YAH SIGLI DAN
PENGADILAN AGAMA BANJARBARU TENTANG KEWARISAN ANAK
PEREMPUAN BERSAMA SAUDARA
(Pendekatan Komparatif Putusan Nomor
46/Pdt.P/2013/MS.Sgidan90/Pdt.P/2017/PA.Bjb)**

SKRIPSI

Oleh:

ARIF RAHMAN HAKIM

15210125



**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PUTUSAN BAKIM MAHKAMAB SYAR'IAH SIGLI DAN PENGADILAN
AGAMA BANJARBARU TENTANG KEWARISANANAK PEREMPUAN
BERSAMA SAUDARA

(Pendekatan Koaiparatif Putusan Nomor
46/Pdt.P/2013/MS.Sgi dan
90/Pdt.P/2017/PA.Bjb)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sa;jana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang 28 Met
2020 Penuli



Rahman
Hakiin NIM
15210125

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Arif Rahman Hakim, NIM 15210125, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH SYAR'IIYAH SIGLI DAN
PENGADILAN AGAMA BANJARBARU TENTANG KEWARISAN ANAK
PEREMPUAN BERSAMA SAUDARA
(Pendekatan Komparatif Putusan Nomor 46/Pdt.P/2013/MS.Sgi dan
90/Pdt.P/2017/PA.Bjb)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

Malang,
Dekan,

Dr. H. Saifullah S.H., M.Hum
19651205 2000031001

MOTTO

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
 الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا وَإِذَا حَضَرَ
 الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا

مَعْرُوف

“ Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peinggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim, dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik”.

(Qs. An-Nisaa ayat: 7-8)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil‘alamin, la haula wala quwata illa billahil „aliyyil adhzim, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Mu penulisan skripsi yang berjudul:

**PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH SYAR’IYAH SIGLI DAN
PENGADILAN AGAMA BANJARBARU TENTANG KEWARISAN ANAK
PEREMPUAN BERSAMA SAUDARA
(Pendekatan Komparatif Putusan Nomor
46/Pdt.P/2013/MS.Sgidan90/Pdt.P/2017/PA.Bjb)**

Dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam yang terangmenderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di akhirat kelak. Amin. Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abd. Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Al-Akhwāl Asy-Syahsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag selaku penguji utama dalam pelaksanaan sidang skripsi

5. Erik Sabti Rahmawati, M.A. M.Ag selaku ketua dalam pelaksanaan siding skripsi.
6. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah membimbing dan mengayomi penulis dengan sepenuh hati.
7. Dr. H. M. Fauzan Zenrif, M.Agselaku Dosen Wali Penulis yang banyak memberikan nasehat serta bimbingannya selama menempuh perkuliahan penulis.
8. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan Rahmat-Nya kepada beliau semua.
9. Serta berbagai pihak yang ikut serta membantu proses penyelesaian penulisskripsi ini yang tidak disebutkan satu persatu.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Penulis hanya sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 28 Mei 2020

Penulis

Arif Rahman Hakim
NIM 15210125

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)

ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ('), berbalik dengan koma (') untuk pengganti lambang "ع".

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi *qâla*

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi *qîla*

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi *dûna*

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi *qawlun*

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi *khayrun*

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fī rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

A. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan

B. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan

C. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*

D. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu
 النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وإن الله لهو خير الرازقين - *wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn*.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = *wa maâ Muhammadun illâ Rasûl*

إن أول بيت وضع للنس = *inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan

kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله وفتح قريب = *nas'run minallâhi wa fathun qarîb*

الله الامر جميعا = *lillâhi al-amru jamî'an*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITARASI.....	vii
DAFTAR ISI.	xiii
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT.	xv
مستخلص البحث.....	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Definisi Operasional.....	5
F. Metode Penelitian	6
G. Penelitian Terdahulu.....	11
H. Sistematika Penulisan	15

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Produk Hukum Pengadilan	18
B. Mahkamah Syariah.....	24
C. Kedudukan Anak Perempuan Bersama dengan Saudara dalam Kewarisan	26

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Putusan Hakim Nomor 46/Pdt.P/2013/Ms.Sgi dan 90/Pdt.P/2017/PA.Bjb	40
B. Paradigma hakim dalam putusan Nomor 46/Pdt.P/2013/Ms.Sgi dan 90/Pdt.P/2017/PA.Bjb	42
C. Analilis terhadap Perbedaan Putusan Nomor 46/Pdt.P/2013/Ms.Sgi dan 90/Pdt.P/2017/PA.Bjb	51

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	64
B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA	66
-----------------------------	-----------

RIWAYAT HIDUP	70
----------------------------	-----------

LAMPIRAN

ABSTRAK

Arif Rahman Hakim, 15210125. 2020. **Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli Dan Pengadilan Agama Banjarbaru Tentang Kewarisan Anak Perempuan Bersama Saudara (Pendekatan Komparatif Putusan Nomor 46/Pdt.P/2013/MS.Sgidan90/Pdt.P/2017/PA.Bjb)**

Pembimbing: Dr. Zainul Mahmudi, M.A.

Kata Kunci: kewarisan anak perempuan bersama saudara, putusan, hijab

Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 46/Pdt.P/2013/MS.Sgi tentang kewarisan anak perempuan bersama dengan saudara menetapkan bahwa anak perempuan memiliki kekuatan untuk menghijab saudara untuk menerima harta warisan. Sedangkan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 90/Pdt.P/2017/PA.Bjb. pada kasus yang sama menetapkan bahwa adanya anak perempuan tidak menghijab saudara untuk menerima harta warisan. Dengan adanya perbedaan dari kedua putusan tersebut, maka fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui paradigma yang digunakan oleh hakim dalam memberikan putusan atas tersebut. Serta untuk membandingkan dari kedua putusan tersebut sehingga dapat diperoleh kesimpulan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan komparatif. Pendekatan komparatif dilakukan guna membandingkan kedua putusan tersebut yang mempunyai masalah tentang kewarisan anak perempuan bersama saudara. Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer berupa putusan nomor 46/Pdt.P/2013/MS.Sgi dan 90/Pdt.P/2017/PA.Bjb. sedangkan bahan hukum primer berupa buku-buku terkait kewarisan dan putusan hakim. Metode pengumpulan bahan hukum menggunakan studi dokumen atau studi kepustakaan. Pengolahan data yang digunakan yaitu dengan tahap pemeriksaan data, klarifikasi, verifikasi, analisis, kesimpulan.

Kesimpulan dari penelitian ini (1).Paradigma yang digunakan oleh hakim pada putusan nomor 46/Pdt.P/2013/MS.Sgi yakni, selagi masih ada anak baik anak laki-laki maupun perempuan, maka saudara menjadi terhalang mendapat waris dipertimbangkan berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 86 K/AG/1994. Sedangkan putusan nomor 90/Pdt.P/2017/PA.Bjb. tidak menjadikan anak perempuan sebagai penghalang kewarisan bagi saudara, didasarkan kepada makna walad dalam surat An-Nisa ayat 176. (2). Putusan Mahkamah Syariah Sigli nomor 46/Pdt.P/2013/MS.Sgi. lebih baik karena menetapkan perkara selain berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung juga berdasarkan peraturan perundang-undangan yakni KHI pasal 174 ayat (2) dan 182, sehingga putusan tersebut lebih relevan untuk berlaku pada masyarakat Indonesia. Adapun putusan Pengadilan Agama Banjarbaru nomor 90/Pdt.P/2017/PA.Bjb menetapkan bukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi berdasarkan keadilan yang ada berupa saudara yang kurang mampu dari segi ekonomi dan diangkatnya saudara sebagai wali pengampu bagi anak perempuan.

ABSTRACT

Arif Rahman Hakim, 15210125. 2020. **Judgment of Court judge Shar'iyah Sigli and religious court Banjarbaru about the inheritance of girls with relatives (comparative approach of verdict No. 46/PDT. P/2013/MS. Sgi and 90/PDT. P/2017/PA. BJB)**

Instructor: Dr. Zainul Mahmudi, M.A.

Keywords: the inheritance of girls with brother, verdict, hijab

The ruling of the Court of Shar'iyah No. 46/Pdt.P/2013/Ms.Sgi about the inheritance of girls together with the brothers determined that girls have the power to Hijab brothers to receive the treasures of inheritance. While the religious court of Banjarbaru No. 90/Pdt.P/2017/PA.Bjb. In the same case stipulates that the presence of girls does not hijab brothers to receive the treasures of inheritance. With the distinction of these two decisions, the focus of this research is to know the paradigm used by the judges in giving the verdict. And to compare from both decisions so that can be obtained conclusions.

This type of research is a normative study, using comparative approaches. Comparative approach was conducted to compare the two decisions that have problems about the inheritance of girls with relatives. Legal material used in the form of primary legal material in the form of verdict number 46/Pdt. P/2013/Ms.Sgi and 90/Pdt.P/2017/PA.Bjb. While the primary legal materials are books related to inheritance and judgment of judges. Methods of collecting legal materials using document studies or literature studies. The processing of data used is the data inspection stage, clarification, verification, analysis, conclusion.

The conclusion of this research (1). The paradigm used by the judge in decision number 46/Pdt.P/2013/Ms.Sgi, namely, while there are still children, both boys and girls, then siblings are prevented from inheriting considered based on jurisprudence of the Supreme Court number 86 K/AG/1994. Meanwhile, decision number 90/Pdt.P/2017/PA.Bjb. does not make girls a barrier to inheritance for siblings, based on the meaning of walad in Surah An-Nisa verse 176. (2). Sigli Syariah Court decision number 46/Pdt.P/2013/Ms.Sgi. It is better because it determines cases not only based on the jurisprudence of the Supreme Court but also based on statutory regulations, namely KHI articles 174 paragraphs (2) and 182, so that these decisions are more relevant to apply to Indonesian society. The Banjarbaru Religious Court decision number 90/Pdt.P/2017/PA.Bjb stipulates not based on the applicable laws and regulations, but based on existing justice in the form of an economically disadvantaged sibling and the appointment of a sibling as guardian for girls.

مستخلص البحث

عارف رحمن حكيم ، 202015210125 قرار القاضي في محكمة الشغارية السارية ومحكمة بنجاربارو الدينية بشأن ميراث الفتيات مع أخيك (نُهج مقارن للقرار رقم 90/Pdt.P/2017/PA.Bjb و 46/Pdt.P/2013/MS.Sgi)

المشرف: د. زين الحمودي ، ماجستير

الكلمات الرئيسية: ميراث البنت ولأخ، الحكم، الحجاب

قرار محكمة الشريعة سيجلي رقم 46/Pdt.P/2013/MS.Sgi بشأن ميراث الفتيات معكم ينص على أن للفتيات القدرة على حجابك في الحصول على الميراث. بينما محكمة بنجاربارو الدينية رقم 90/Pdt.P/2017/PA.Bjb. وفي نفس الحالة تنص على أن وجود بنت لا تحجب الأخ لتلقي الميراث. مع الاختلافات بين القرارين ، تركز هذه الدراسة على معرفة النموذج الذي يستخدمه القاضي في اتخاذ القرار بشأنه. ومقارنة القرارين بحيث يمكن الحصول على الاستنتاجات.

هذا النوع من البحث هو بحث معياري ، باستخدام نهج مقارن. يتم اتباع نهج مقارن لمقارنة القرارين اللذين لديهما مشاكل مع ميراث الفتيات والأقارب. المواد القانونية المستخدمة هي في شكل مواد قانونية أولية في شكل القرار رقم 46/Pdt.P/2013/MS.Sgi و 90/Pdt.P/2017/PA.Bjb. في حين أن المادة القانونية الأولية هي في شكل كتب تتعلق بالميراث وقرارات القضاة. تستخدم طريقة جمع المواد القانونية دراسات توثيق أو دراسات أدبية. معالجة البيانات المستخدمة هي مرحلة فحص البيانات والتوضيح والتحقق والتحليل والاستنتاجات.

استنتاج هذا البحث.(1) النموذج الذي استخدمه القاضي في القرار رقم 46/Pdt.P/2013/MS.Sgi هو أنه بينما لا يزال هناك أطفال ، فإن الأخوة يُمنعون من الميراث بناءً على اجتهاد المحكمة العليا رقم 86 K/AG/1994، القرار رقم 90/Pdt.P/2017/PA.Bjb لا تجعل البنات حاجزاً في الإرث للأخوة ، في سورة النساء الآية 176.(2) قرار محكمة سيجلي الشرعية رقم 46/Pdt.P/2013/MS.Sgi. من الأفضل لأنها تحدد القضايا ليس فقط على أساس اجتهاد المحكمة العليا ولكن أيضاً على أساس اللوائح القانونية ، وهي المادة 174 الفقرتين (2) و 182. ينص قرار المحكمة الدينية في بنجاربارو رقم 90/Pdt.P/2017/PA.Bjb على عدم استناداً إلى

القوانين واللوائح المعمول بها ، ولكن استنادًا إلى العدالة القائمة في شكل شقيق محروم اقتصاديًا
وتعيين شقيق كوصي للفتيات

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Putusan Mahkamah Syariah Sigli Nomor 46/Pdt.P/2013/MS.Sgi berisi tentang permohonan penetapan ahli waris. Pada permohonan terdapat pemohon yang terdiri dari seorang anak perempuan kandung, dan tiga saudara perempuan kandung. Putusan pada perkara tersebut yakni hakim menetapkan yang menjadi ahli waris adalah anak perempuan kandung dan tiga orang saudara perempuan kandung tidak mendapatkan bagian harta warisan. Sehingga dari putusan tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan adanya anak perempuan kandung dalam kewarisan bersama saudara, dapat menghalangi bagian saudara dalam mendapatkan warisan.

Kemudian pada putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 90/Pdt.P/2017/PA.Bjb berupa perkara penetapan ahli waris yang terdiri dari isteri, tiga orang anak perempuan kandung, dua orang saudara laki-laki kandung. Dalam penetapannya hakim memutuskan yang berhak untuk mendapatkan waris yakni isteri, anak perempuan, dan saudara laki-laki kandung. Maka, dari putusan tersebut disimpulkan bahwa adanya anak perempuan kandung tidak menghalangi bagian warisan dari saudara.

Kedua putusan tersebut memiliki permasalahan yang sama yakni warisan anak perempuan bersama dengan saudara. Namun keduanya memiliki putusan yang berbeda. Dimana Putusan Mahkamah Syariah Sigli Nomor 46/Pdt.P/2013/MS.Sgi menetapkan bahwa adanya anak perempuan menyebabkan terhalangnya saudara dalam mendapatkan warisan. Sedangkan pada putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 90/Pdt.P/2017/PA.Bjb menetapkan adanya anak perempuan tidak menjadi penghalang bagi saudara untuk mendapatkan warisan.

Perbedaan putusan tersebut disebabkan oleh berbedanya paradigma hakim dalam menafsirkan suatu hukum dalam permasalahan yang sama yakni warisan anak perempuan bersama dengan saudara. Hakim diberikan kebebasan penuh dalam melakukan penemuan hukum. Penemuan hukum tersebut dilakukan karena kurang sempurnanya kodifikasi hukum yang tidak mencakup seluruh peristiwa hukum yang ada di masyarakat.

Sehingga seorang hakim tidak hanya terfokus kepada kodifikasi hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus melihat pada

keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tentunya dalam melakukan penemuan hukum tidak boleh melupakan tujuan dari pembuat peraturan perundang-undangan. Sehingga dalam penemuan hukum diperlukan beberapa cara penafsiran hukum oleh hakim yang disebut juga dengan interpretasi¹.

Perbedaan pendapat hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara yang berkaitan dengan warisan anak perempuan bersama dengan saudara tersebut disebabkan karena adanya perbedaan pendapat dikalangan ulama terkait masalah waris. Terdapat beberapa mazhab dan pemikiran yang mengeluarkan ijtihad tentang penetapan ahli waris serta pembagian ahli waris. Walaupun sumbernya berasal dari Al-Quran dan Hadits, akan tetapi terdapat beberapa penafsiran dan pandangan yang berbeda dalam memaknai nash dalam Al-Quran dan Hadits tersebut.

Waris merupakan ilmu yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, dikarenakan permasalahan yang berkaitan dengan harta menjadi suatu yang sensitive apabila tidak ditangani dengan cara yang benar. Bahkan tidak jarang banyak keluarga yang kemudian bertengkar dan tidak lagi akur sebagai keluarga dikarenakan adanya pembagian harta warisan yang dianggap tidak adil oleh mereka. Para ulama kemudian berpendapat bahwa mempelajari ilmu waris merupakan fardhu kifayah², karena memiliki manfaat yang sangat besar dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Sebagaimana Rasulullah S.A.W bersabda:

¹C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia cet ke VIII*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989). 65-66.

² Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam, sebagai pembaruan hukum positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). 11

تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ، فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى، وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي (رواه

ابن ماجه ه و الدار قطنى)

Artinya: Belajarlah faraidh dan ajarkanlah dia kepada manusia, karena ia itu adalah separuh ilmu, dan ia akan dilupakan, dan ia adalah yang pertama akan dicabut dari ummatku (HR. Ibnu Majah dan Daruquthni)³.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan digunakan adalah sebagai berikut

1. Apakah paradigma yang digunakan oleh hakim dalam putusan nomor 46/Pdt.P/2013/MS.Sgi dan 90/Pdt.P/2017/PA.Bjb tentang kewarisan anak perempuan bersama saudara?
2. Bagaimana analisis terhadap perbedaan putusan nomor 46/Pdt.P/2013/MS.Sgi dan 90/Pdt.P/2017/PA.Bjb tentang kewarisan anak perempuan bersama saudara?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui paradigma yang digunakan oleh hakim dalam putusan Nomor 46/Pdt.P/2013/Ms.Sgi dan 90/Pdt.P/2017/Pa.Bjb tentang kewarisan anak perempuan bersama saudara.
2. Untuk menganalisis perbedaan dan kesamaan serta kesimpulan pada putusan Nomor 46/Pdt.P/2013/Ms.Sgi dan 90/Pdt.P/2017/Pa.Bjb tentang kewarisan anak perempuan bersama saudara.

D. Manfaat Penelitian

³ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, 10.

Hasil dari penelitian yang dilakukan diharapkan mampu untuk memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang warisan anak perempuan bersama saudara.
- b. Hasil penelitian dapat digunakan untuk kegiatan penelitian berikutnya yang sejenis.

2. Kegunaan praktis

a. Bagi pembaca

Penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat pada umumnya dan pihak-pihak yang terkait pada khususnya tentang peningkatan pemahaman tentang warisan anak perempuan bersama saudara.

b. Bagi lembaga pendidikan

Dalam hal ini adalah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, terkhusus Fakultas Syari'ah jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah untuk menambah pemberdaharaan perpustakaan. Penelitian ini terhadap penulis dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang baru tentang kewarisan anak perempuan bersama saudara.

c. Bagi praktisi hukum

Penelitian diharapkan dapat menjadi pertimbangan hukum dalam kasus yang berkaitan dengan kedudukan ahli waris perempuan bersama dengan saudara.

E. Definisi Operasional

Pencantuman definisi pada penelitian ini tidak lain yaitu untuk membantu pemahaman terhadap isi dari proposal ini, maka perlu kiranya menjelaskan atau memberi penegasan terhadap judul penelitian. Di antara yang diberi penegasan adalah:

1. Perbandingan Putusan

Perbandingan putusan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah putusan yang memiliki kesamaan yang berkaitan tentang kewarisan anak perempuan bersama dengan saudara, namun dalam putusannya memiliki perbedaan dalam hasil putusan. Perbedaannya yaitu putusan yang satu memutuskan bahwa anak perempuan menjadi penghalang bagi saudara dalam kewarisan sedangkan putusan lainnya memutus bahwa anak perempuan tidak bisa menghalangi saudara dalam kewarisan.

2. Kewarisan Anak Perempuan Bersama Saudara

Kewarisan anak perempuan yang dimaksud dalam penelitian ini yakni ahli waris yang ditinggalkan oleh pewaris adalah anak perempuan dari pewaris yang pada saat kematian pewaris juga terdapat saudara dari pewaris baik itu saudara laki-laki sekandung, saudara perempuan sekandung, saudara laki-laki seayah, saudara perempuan seayah, saudara laki-laki seibu dan saudara perempuan seibu. Keduanya telah mendapatkan bagiannya masing-masing yang telah diatur oleh peraturan yang ada baik dari perundang-undangan ataupun dari hukum Islam. Saudara yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah saudara laki-laki kandung dan saudara perempuan kandung.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian, tentunya harus menggunakan metode-metode terkait penelitian tersebut, metode tersebut yakni:

1) Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif memfokuskan kepada studi terhadap kepustakaan⁴. Adapun yang menjadi fokus penelitian adalah kajian terhadap putusan Mahkamah Syariah Sigli Nomor 46/Pdt.P/2013/MS.Sgi dan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 90/Pdt.P/2017/PA.Bjb tentang warisan anak perempuan bersama dengan saudara.

2) Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan berupa pendekatan komparatif dalam penelitian ini yang dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum⁵. Dalam hal dilakukan perbandingan antara putusan Mahkamah Syariah Sigli Nomor 46/Pdt.P/2013/MS.Sgi dan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 90/Pdt.P/2017/PA.Bjb). Adapun dari segi keilmuan digunakan pendekatan fiqh sebagai perbandingan dari kedua putusan tersebut

3) Bahan Hukum

Sebagaimana telah disebutkan penelitian ini bersifat normatif. Jadi karakteristik utama dalam penelitian ilmu hukum normatif dalam

⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 13.

⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Kencana: Jakarta, 2010), 132-133.

melakukan pengkajian hukum terletak pada datanya⁶. Kemudian bahan hukum tersebut dibagi menjadi bahan hukum primer dan sekunder.

Bahan hukum primer yang berupa data inti pada penelitian berasal dari:

- a. Putusan Mahkamah Syariah Sigli Nomor 46/Pdt.P/2013/MS.Sgi
- b. Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 90/Pdt.P/2017/PA.Bjb
- c. Kompilasi Hukum Islam
- d. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 86 K/AG/1994

Adapun bahan hukum sekunder berasal dari undang-undang, buku, jurnal, serta artikel yang berkaitan dengan pembahasan seperti M. Anshary MK, *Hukum Kewarisan dalam Teori dan Praktik*, Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam, Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*.

4) Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data merupakan cara yang digunakan dalam pengumpulan data. Dikarenakan penelitian bersifat normatif, maka pengumpulan sekunder dilakukan dengan cara menggunakan studi dokumen atau studi pustaka dari bahan-bahan pustaka⁷. Dalam penelitian ini digunakan dokumen dari putusan Mahkamah Syariah Sigli Nomor 46/Pdt.P/2013/MS.Sgi dan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 90/Pdt.P/2017/PA.Bjb, Kompilasi Hukum Islam, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 86 K/AG/1994.

5) Metode Analisis Bahan Hukum

⁶Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Mandar Maju 2008), 80.

⁷Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, 12.

Pengolahan data ini perlu adanya prosedur pengolahan dan analisis data sebagai berikut:⁸

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Editting merupakan proses peninjauan terhadap bahan hukum yang dikumpulkan. Baik dari segi kesesuaian makna, tujuannya, dan relevansi isu agar dapat menunjang penelitian yang dilakukan, meminimalisir, kesalahan dan kekurangan dalam melakukan penelitian⁹. Proses pemeriksaan data yang dilakukan meliputi putusan Mahkamah Syariah Sigli Nomor 46/Pdt.P/2013/MS.Sgi dan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 90/Pdt.P/2017/PA.Bjb, Kompilasi Hukum Islam, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 86 K/AG/1994, serta buku yang berkaitan dengan warisan anak perempuan bersama dengan saudara.

b. Klasifikasi (*classifying*)

Klasifikasi adalah pengelompokkan atau penggolongan bahan pustaka yang menjadi sumber bahan hukum dalam penelitian¹⁰. Penelitian ini, mengelompokkan data berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Tujuannya yaitu agar lebih mudah dalam pembahasannya. Data klasifikasi menjadi dua macam data. Pertama paradigma yang digunakan oleh hakim dalam putusan Nomor 46/Pdt.P/2013/ms.sgi dan Nomor 90/Pdt.P/2017/Pa.Bjb tentang warisan anak perempuan bersama saudara. Kedua analisis terhadap perbandingan

⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: fakultas Syari'ah, 2015), 22.

⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*,(Jakarta :Rineka Cipta 2010),182.

¹⁰ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 50.

putusan Nomor 46/Pdt.P/2013/Ms.Sgi dan 90/Pdt.P/2017/Pa.Bjb tentang kewarisan anak perempuan bersama saudara.

c. Vertifikasi (*verifying*)

Vertifikasi adalah tes atau uji data penelitian terdahulu dengan data penelitian data yang telah di teliti oleh peneliti di masa sekarang. Tujuan vertifikasi ini yaitu untuk membuktikan bahwa penelitian ini benar–benar original. Dalam hal ini memeriksa kembali sumber bahan hukum yang telah didapat seperti bahan hukum dari berbagai undang-undang maupun peraturan yang membahas tentang kewarisan anak bersama dengan saudara.

d. Analisis (*analysing*)

Analisis Pada tahap ini peneliti menganalisis bahan hukum serta menyesuaikan dengan metode dan pendekatan yang dipergunakan. Dalam penelitian normatif¹¹. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk membatasi sehingga menjadi data yang teratur, tersusun dan lebih berarti. Penelitian ini akan menggunakan analisis deskriptif komparatif untuk memberikan gambaran terhadap putusan nomor 46/Pdt.P/2013/Ms.Sgi dan 90/Pdt.P/2017/Pa.Bjb tentang kewarisan anak perempuan bersama saudara kemudian membandingkan kedua putusan tersebut sehingga diperoleh perbedaan dan persamaan antara keduanya serta mengetahui kesimpulan dari kedua putusan tersebut.

Disamping itu, digunakan juga analisis konten. Analisis konten atau yang disebut juga dengan content analysis, merupakan salah satu metode dalam menganalisis hal yang berbentuk teks, dimana ia tidak memandang teks sebagai

¹¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 23.

kumpulan peristiwa, akan tetapi teks tersebut dipandang satu kesatuan majemuk dan kompleks¹².

e. Pembuatan kesimpulan (*concluding*)

Pembuatan kesimpulan adalah suatu tahap akhir, atau penyimpulan dari bahan-bahan penelitian yang diperoleh. Tujuannya agar untuk menjawab apa yang menjadi latar belakang, dan rumusan masalah dalam penelitian ini. Sehingga setelah semua data terkumpul dan hasil penelitian sudah ditemukan kemudian memberikan kesimpulan dari data-data yang telah diolah untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang telah dipaparkan terkait perbedaan putusan Nomor 46/Pdt.P/2013/Ms.Sgi dan 90/Pdt.P/2017/Pa.Bjb tentang kewarisan anak perempuan bersama saudara.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berperan sebagai pembanding dan rujukan dari penelitian yang akan dilakukan. Penelitian terdahulu juga digunakan untuk mengetahui bahwa penelitian ini tidak sama dengan penelitian-penelitian yang telah ada, sehingga penelitian ini dapat terus dilanjutkan, karena penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang telah ada. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi dari Nisa Oktafiani tahun 2014 dengan judul Anak Perempuan Sebagai Hijab Hirman Terhadap Kewarisan Ashabah bin Nafsih

¹²M. Raharjo, *Content Analysis Sebagai Metode Tafsir Teks: akar sejarah dan penggunaannya*. (Malang. 2017), Diakses pada tanggal 20 Maret 2020.

(Analisis Putusan Mahkamah Agung RI No. 86/KAg/1994)¹³. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang meneliti kesenjangan hukum yang terjadi pada hukum yang seharusnya berupa KHI dan hukum waris Islam dengan hukum yang diterapkan pada putusan MA No. 86K/AG/1994. Sumber data yang digunakan berupa putusan tersebut dan wawancara kepada hakim Agung. Adapun hasil dari penelitian tersebut yakni hakim dalam membuat putusan dapat mengeluarkan putusan yang berbeda dari hukum yang ada secara umum untuk menciptakan keadilan pada putusan tersebut. Namun dalam putusan tersebut hakim tidak boleh keluar dari peraturan yang telah ada, sehingga hakim harus memahami makna dan filosofi dari peraturan tersebut dan diperolehah penemuan hukum yang sesuai dengan kasus tersebut. Pada putusan Mahkamah Agung tersebut hakim melakukan upaya penemuan hukum temen metode interpretasi gramatikal pada makna *walad* pada surat An-Nisa ayat 176 dimana baik anak laki-laki ataupun perempuan setara yang mengambil pendapat dari Ibnu Abbas. Persamaan dengan penelitian ini yakni membahas penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam menangani perkara tentang warisan anak perempuan bersama dengan saudara. Namun peneliti membahas tentang perbandingan putusan hakim dalam perkara tersebut, dimana putusan hakim pertama menetapkan bahwa anak perempuan menjadi hijab bagi saudara, sedangkan putusan lainnya menetapkan bahwa anak perempuan tidak dapat menghijab saudara.

¹³Nisa Oktafiani , *Anak Perempuan Sebagai Hijab Hirman Terhadap Kewarisan Ashabah bin Nafsih (Analisis Putusan Mahkamah Agung RI No. 86K/Ag/1994*, skripsi, (Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014), diakses pada 30 Agustus 2019.

Kedua, skripsi oleh Yudan Fatoni tahun 2010 yang berjudul Putusan Pengadilan Agama Bangil No. 538/Pdt.G/PA.Bgl tentang Anak Perempuan Menghijab Saudara Laki-laki Kandung Perspektif Fiqh Indonesia¹⁴. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang membahas tentang dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara tersebut yang kemudian dikaitkan dengan perspektif fiqh Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian tersebut menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian tersebut adalah dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam putusan tersebut yakni Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 86/AG/1994. Adapun fiqh Indonesia yang digunakan mengambil makna *walad* dari pendapat Ibnu Abbas yaitu anak laki-laki dan anak perempuan memiliki kesetaraan sehingga dapat menjadi hijab bagi saudara kandung. Persamaan dengan penelitian ini adalah membahas tentang warisan anak perempuan bersama saudara dan putusan pada pengadilan mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung No 86K/AG/1994. Peneiti menggunakan metode perbandingan putusan dimana terdapat perbedaan pada putusan yang satu dengan yang lainnya yang tidak sama dengan putusan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut yakni anak perempuan tidak dapat menghijab saudara.

Ketiga, jurnal oleh Muwahid dengan judul Metode Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif¹⁵. Hasil penelitian tersebut yakni setiap undang-undang harus dibuat secara jelas. Namun nayatnya

¹⁴Yudan Fatoni, *Putusan Pengadilan Agama Bangil No. 538/Pdt.G/PA.Bgl tentang Anak Perempuan Menghijab Saudara Laki-laki Kandung Perspektif Fiqh Indonesia*, skripsi, (Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2010), diakses pada 30 Agustus 2019.

¹⁵Muwahid, *Metode Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif*, Al-Hukama (Juni 2017), diakses pada tanggal 30 Agustus 2019.

tidak semua undang-undang mampu untuk menjelaskan seluruh peristiwa yang terjadi. Oleh karena itu dibutuhkan upaya penemuan hukum untuk memberikan penjelasan dari setiap undang-undang tersebut. Melakukan upaya hukum dapat dilakukan dengan menjelaskan, menafsirkan atau melengkapi peraturan perundang-undangan. Persamaan dengan penelitian ini adalah membahas tentang upaya penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim agar tidak terjadinya kekosongan hukum, namun pada penelitian ini peneliti membahas upaya hukum tersebut pada perkara warisan anak perempuan bersama dengan saudara.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Nisa Oktafiani, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah, UIN Syarif Hidayatullah 2014 Anak Perempuan Sebagai Hijab Hirman Terhadap Kewarisan Ashabah bin Nafsih (Analisis Putusan Mahkamah Agung RI No. 86K/Ag/1994	Membahas tentang upaya penemuan hukum oleh hakim dalam perkara warisan anak perempuan bersama dengan saudara	Membahas tentang anak perempuan sebagai hijab bagi saudara.
			Membahas tentang perbedaan putusan hakim dimana salah satu putusan menetapkan anak perempuan sebagai hijab bagi saudara sedangkan lainnya menetapkan anak perempuan tidak dapat menjadi hijab bagi saudara.
2	Yudan Fatoni, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim 2010	Membahas putusan hakim tentang warisan anak perempuan bersama saudara.	Membahas putusan hakim yang menetapkan bahwa anak perempuan dapat menjadi hijab bagi saudara

	Putusan Pengadilan Agama Bangil No. 538/Pdt.G/PA.Bgl tentang Anak Perempuan Menghijab Saudara Laki-laki Kandung Perspektif Fiqh Indonesia		Membahas tentang upaya penemuan hukum oleh hakim serta pebandingan putusan hakim dalam menetapkan warisan anak perempuan bersama saudara dimana salah satu putusan menetapkan anak perempuan menjadi hijab bagi saudara sedangkan putusan lainnya menetapkan anak perempuan tidak dapat menjadi hijab bagi saudara
3	Muwahid, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya 2017 Metode Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif.	Membahas upaya penemuan hukum oleh hakim	Membahas penemuan hukum oleh hakim secara umum beserta metode yang digunakan dalam upaya penemuan hukum oleh hakim Membahas upaya penemuan hakim serta perbandingan putusan dalam perkara warisan anak perempuan bersama dengan saudara.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman isi penelitian ini, maka sistematika penulisannya dibagi menjadi empat bab, yang isinya adalah hal-hal pokok yang dapat dijadikan pijakan untuk memahami pembahasan ini. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut;

Bab pertama, berisi pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah dari judul yang dipilih oleh peneliti, rumusan masalah merupakan permasalahan sebagai acuan untuk diteliti, tujuan dan manfaat penelitian sebagai bentuk jawaban dari penelitian yang sedang dikaji, definisi operasional membahas tentang pengertian dari kata-kata yang bersifat abstrak dalam judul penelitian,

metode penelitian sebagai langkah-langkah yang akan digunakan untuk mempermudah jalan penelitian, penelitian terdahulu sebagai tolak ukur mengetahui adanya persamaan dan perbedaan pembahasan dengan penelitian yang lalu dan diakhiri dengan sistematika pembahasan yang menginformasikan urutan skripsi.

Bab kedua, berisi tentang kajian pustaka yang digunakan sebagai alat untuk menganalisis rumusan masalah yang ada. Adapun kajian pustaka yang ada pada penelitian ini adalah produk hukum pengadilan yang berisi tentang produk hukum pengadilan yang terdiri atas putusan dan penetapan. Kemudian akan dibahas pula mengenai mahkamah syariah yang berada di Indonesia serta kedudukan anak perempuan bersama dengan saudara dalam kewarisan.

Bab ketiga, berisi tentang penjelasan akan paradigma yang digunakan oleh hakim dalam putusan mahkamah Syariah sigli nomor 46/pdt.p/2013/ms.sgi dan pengadilan agama banjarbaru nomor 90/pdt.p/2017/pa.bjb tentang warisan anak perempuan bersama saudara. Kemudian akan membahas analisis terhadap perbedaan putusan nomor 46/Pdt.P/2013/MS.Sgi dan 90/Pdt.P/2017/PA.Bjb tentang warisan anak perempuan bersama saudara, juga berupa kesimpulan ataupun hasil dari perbandingan antara kedua keputusan tersebut untuk dicari mana yang lebih baik satu sama lainnya.

Bab keempat, merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dari pemaparan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan dalam bab ini dimaksudkan untuk memberikan atau menunjukkan bahwa problem yang diajukan

dalam penelitian ini bisa dijelaskan secara komprehensif dan diakhiri dengan saran untuk dikembangkannya studi lebih lanjut.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Produk Hukum Pengadilan

Pengadilan adalah suatu lembaga yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara atau permasalahan. Setelah melakukan pemeriksaan memberikan pengadilan maka pengadilan harus mengeluarkan produk hukum dari perkara tersebut. Adapun produk hukum yang dikeluarkan oleh hakim pengadilan terdapat dalam pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yakni putusan dan penetapan.¹⁶

Putusan adalah pernyataan yang dikeluarkan oleh hakim, yang bertugas sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara, kemudian diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk

¹⁶Pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

mengakhiri atau menyelesaikan perkara¹⁷. Putusan pengadilan oleh hakim harus dibuat dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh majelis hakim yang memeriksa perkara sebagaimana yang telah dibentuk oleh ketua pengadilan, panitera pengganti yang ikut dalam persidangan juga harus menandatangani. Ucapan hakim pada saat membaca putusan dalam persidangan harus sesuai dengan yang tertulis dalam putusan¹⁸.

Putusan merupakan hasil akhir dari sengketa, dimana hakim diharapkan tidak memihak kepada salah satu pihak yang bersengketa. Untuk dapat menyelesaikan perkara, hakim hendaknya mengetahui secara objektif tentang duduk perkaranya. Hakim dapat mengetahui peristiwa yang sebenarnya setelah mengetahui peristiwa tersebut dengan benar saat melakukan pemeriksaan dengan benar sewaktu membuktikan alat-alat bukti yang ada dalam perkara yang diadili oleh hakim tersebut. Putusan tersebut mempunyai akibat hukum pada para pihak dan pihak lain. Pihak yang dimaksud adalah sebagai berikut¹⁹:

1. Para pihak yang bersengketa
2. Masyarakat
3. Pengadilan banding
4. Ilmu pengetahuan

Adapun penetapan adalah produk hukum pengadilan atas perkara permohonan. Penetapan disebut juga bukan peradilan yang sesungguhnya karena

¹⁷Sudikno Metokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009), 212.

¹⁸Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 292.

¹⁹Wahyu Muljono, *Teori dan Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), 137-138 .

dalam perkaranya hanya ada permohonan yang diajukan oleh pemohon untuk ditetapkan tentang suatu perkara dimana pemohon tersebut tidak bersengketa dengan orang lain²⁰. Contohnya yakni penetapan dalam perkara dispensasi nikah, wali adhol, poligami, perwalian, isbat nikah, dan lain sebagainya.

Penetapan merupakan keputusan atas permohonan yang bertujuan untuk menetapkan suatu keadaan atau suatu status tertentu bagi pemohon. Amar putusan dalam penetapan bersifat deklaratoir yaitu menetapkan atau menerangkan saja, sehingga hakim tidak mengadili hanya menetapkan saja. Penetapan hanya mengikat bagi pemohon saja²¹.

Bentuk dan isi penetapan yakni hanya mengandung satu pihak yang berperkara, tidak ada kata “berlawanan dengan”, tidak ada kata “tentang duduk perkaranya” langsung diuraikan permohonan dari pemohon, amarnya hanya berbentuk deklaratoir, menggunakan kata penetapan, biaya perkara dibebankan kepada pemohon, tidak memiliki kekuatan pembuktian dan eksekusi²².

Putusan terdiri dari berbagai macam, adapun macam-macam putusan adalah sebagai berikut:

1. Menurut Jenisnya putusan terdiri dari:

a. Putusan Sela, yaitu putusan yang diucapkan oleh Majelis Hakim disela sela persidangan atau sedang berlangsungnya persidangan dan sebelum putusan akhir, putusan sela tidak mengikat hakim. Pasal 48 dan pasal 332 Rv membedakan putusan sela menjadi:

²⁰Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Pengadilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 213.

²¹Abdullah Tri Wahyudi, *Hukum Acara Peradilan Agama Dilengkapi Contoh Surat-Surat Dalam Praktik Hukum Acara di Peradilan Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2018), 161.

²²Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 123.

1. Putusan Preparatoir, yaitu putusan sela guna mempersiapkan putusan akhir, tanpa ada pengaruh atas pokok perkara atau putusan akhir. (putusan atas penggabungan perkara dan menolak diundurkannya pemeriksaan saksi-saksi)
2. Putusan Interlucotoir, putusan yang isinya memerintahkan pembuktian dan dapat mempengaruhi putusan akhir. (putusan untuk memeriksa saksi-saksi dan pemeriksaan setempat)
3. Putusan Insidentil, putusan atas suatu perselisihan yang tidak begitu mempengaruhi atau berhubungan dengan pokok perkara. (campur tangan pihak ketiga dan penetapan sita)
4. Putusan Provisi, putusan yang menjawab tuntutan provisionil, yaitu permintaan para pihak yang bersangkutan agar untuk sementara diadakan tindakan pendahuluan. (perkara gugat cerai atas kelalaian menafkahi, harus membayarnya terlebih dahulu karena untuk memenuhi kebutuhan hidup yang telah dilalaikan sang suami).

Putusan sela ini tidak dapat dilakukan upaya banding, karena hanya disela-sela persidangan dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap bila ingin diajukan upaya hukum. Dapat diajukan bila mana sudah ada putusan akhir

Putusan Akhir, yaitu putusan yang diucapkan oleh Majelis Hakim diakhir persidangan, dan hal tersebut menandakan berakhirnya perkara dan telah memiliki kekuatan hukum tetap dan sudah dapat dilakukan eksekusi. MA RI dengan Surat Edaran Nomor 5 tahun 1959 dan Nomor 1 tahun 1962 tanggal 7 maret 1962, menginstruksikan agar pada waktu putusan diucapkan, konsep putusan harus sudah selesai dibuat. Dan jika ada perbedaan antara ucapan hakim

dengan yang ditulis, maka yang sah adalah yang diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum²³

2. Menurut sifatnya, putusan terdiri dari:

- a. Putusan Declaratoir, yaitu putusan yang bersifat menyatakan dan menerangkan keadaan atau status hukum. Misalnya pernyataan adanya hubungan suami istri dalam perkara perceraian yang perkawinannya tidak dicatatkan dicatat sipil atau pegawai pencatatan nikah setempat.
- b. Putusan Constitutif, yaitu yang bersifat meniadakan suatu keadaan hukum yang baru. Misalnya putusan perceraian yang semula terikat perkawinan, karena putusan ini menjadi meniadakan status perkawinannya atau sudah resmi cerai.
- c. Putusan Condemnatoir, yaitu putusan yang bersifat menghukum pada salah satu pihak. Misalnya menghukum tergugat untuk menyerahkan tanah yang akan dibagi dalam kewarisan. Dan dalam putusan ini isi putusannya dapat berupa :
 1. Gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verlaard), karena :
 - a. Gugatan kabur atau tidak jelas (Obscuur libel), tergugat tidak jelas keberadaannya atau tidak diketahui.
 - b. Gugatan tidak berdasar hukum, isi gugatan tidak berdasarkan hukum atau melawan hak tergugat.

²³Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata dilingkungan Peradilan Agama*, (Kencana Prenada Group, Jakarta 2005), 307-308.

- c. Gugatan prematur, perkara tersebut belum saatnya untuk dilakukan penggugatan
 - d. Gugatan nebis in idem, yaitu seseorang tidak boleh digugat dua kali dengan perkara yang sama atau yang sudah diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap.
 - e. Gugatan error persona, yaitu gugatan yang salah ditujukan pada seseorang yang itu bukan tergugat.
 - f. Gugatan kadaluarsa, yaitu perkara gugatan yang telah habis masa gugatnya dan tidak boleh digugat.
 - g. Pengadilan tidak berwenang, hal ini berkaitan dengan kewenangan Absolut Pengadilan.
2. Gugatan dikabulkan apabila penggugat dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan dalil-dalil dari apa yang digugatnya, dan gugatan dapat dikabulkan sebagian atau seluruh, tergantung pembuktian dan dalil – dalil yang dibuktikan penggugat.
 3. Gugatan ditolak apabila penggugat tidak dapat membuktikan secara sah dan tidak dapat meyakinkan dalil – dalil dari apa yang digugatnya, hal ini kebalikan dari gugatan dikabulkan.
 4. Gugatan digugurkan apabila penggugat tidak hadir dalam persidangan dengan telah dipanggil secara resmi dan terhormat, namun juga tidak hadir maka perkara atau gugatannya gugur.
 5. Gugatan dibatalkan apabila panjar biaya perkara telah habis dan penggugat telah ditegur supaya membayar biaya panjar perkara, dan apabila dalam

tenggang waktu 1 bulan tidak diindahkan maka dibuat penetapan perkara gugatan dibatalkan dengan membebankan biaya perkara kepada penggugat.

B. Mahkamah Syariah

Salah satu kekhususan yang diperoleh provinsi Aceh dari negara adalah hak dalam membentuk Mahkamah Syari'ah sebagai Peradilan Syariat Islam. Hal tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh pada pasal 128 ayat (2) yang menjelaskan bahwa Mahkamah Syari'ah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh²⁴.

Mahkamah Syari'ah adalah lembaga Peradilan Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam sebagai pengembangan dari Peradilan Agama yang diresmikan pada tanggal 4 Maret 2003 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Kepres Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syari'ah dan Mahkamah Syari'ah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan Qanun provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam

Dasar hukum berdirinya Mahkamah Syari'ah adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 44 tentang penyelenggaraan keistimewaan provinsi Daerah Istimewa Aceh

²⁴Yusrizal Efa Laela Fakhrizal, *Kewenangan Mahkamah Syari'ah di Aceh dihubungkan dengan Sistem Peradilan di Indonesia*, Pustaka Unpad (2014), diakses pada tanggal 6 Oktober 2019.

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai provinsi Naggroe Aceh Darussalam
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
4. Kepres Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syari'ah dan Mahkamah Syari'ah provinsi Naggroe Aceh Darussalam
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/070/SK/X/2004 tanggal 6 Oktober 2004 tentang pelimpahan sebagian kewenangan dari Peradilan Umum kepada Mahkamah Syari'ah di provinsi Naggroe Aceh Darussalam.
6. Qanun provinsi Naggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam
7. Qanun provinsi Naggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam bidang aqidah, ibadah, dan syi'ar Islam
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
9. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman

Adapun kewenangan Mahkamah Syariah Aceh sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai provinsi Naggroe Aceh Darussalam, Kepres Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syari'ah dan Mahkamah Syari'ah provinsi Naggroe Aceh Darussalam, dan Qanun provinsi Naggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam yakni memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara banding tingkat pertama tingkat pertama dan banding yang berkaitan dengan:

1. Al-Ahwal Al-Syakhsiyah

2. Mu'amalah

3. Jinayah

C. Kedudukan Anak Perempuan bersama dengan Saudara dalam Kewarisan

1. Pengertian waris

Dalam sistem hukum Islam, kata waris merupakan kata yang diambil dari bahasa Arab yang artinya mewarisi. Jika dikaitkan dengan kondisi yang berkembang di masyarakat Indonesia, istilah waris dapat diartikan sebagai suatu perpindahan berbagai hak dan kewajiban serta harta kekayaan seorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup²⁵. Hukum yang mengatur pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh ahli waris, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari peninggalan setiap ahli waris yang berhak menerimanya²⁶.

Sehingga waris adalah perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup. Dengan demikian secara garis besar definisi warisan yaitu perpindahan berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seorang yang meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup dengan memenuhi syarat dan rukun dalam mewarisi.

2. Kedudukan anak perempuan dalam waris

Allah menjelaskan hak dalam kewarisan anak laki-laki maupun anak perempuan dalam Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 11 sebagai berikut:

²⁵Muslih Maruzi, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, Cet, ke-I(Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra,1997), 6.

²⁶Ah. Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*,cet. Ke-4 (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000),355.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

*Artinya: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anak yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu satu orang saja, maka ia memperoleh separoh harta dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh ibu-bapaknya saja, maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengatahui lagi Maha Bijaksana"*²⁷. (Q.S: an-Nisa': 11).

Pada ayat tersebut terdapat ketentuan bahwa anak laki-laki mendapatkan waris dua kali lebih banyak dari anak perempuan atau anak perempuan memperoleh setengah bagian waris dibandingkan dengan anak laki-laki. Hal tersebut dikarenakan kewajiban anak laki-laki lebih berat dari anak perempuan. Terlebih jika anak laki-laki tersebut menikah maka ia memiliki kewajiban untuk membayar mahar, menafkahi keluarga, istri dan anaknya. Nafkah yang ditanggung berupa nafkah untuk kehidupan sehari-sehari serta keperluan lain seperti pendidikan untuk anaknya. Berbeda dengan anak perempuan yang menerima mahar dan nafkah dari suaminya, sehingga anak perempuan dapat

²⁷Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 117.

memiliki harta yang lebih banyak dan memiliki kesetaraan dengan anak laki-laki karena tidak memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarganya.²⁸.

Kedudukan anak perempuan dalam waris adalah ahli waris yang memiliki bagian pasti yang telah diatur dalam Al-Quran. Adapun bagian yang didapat oleh anak perempuan dalam kewarisan adalah sebagai berikut²⁹:

- a. Mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ apabila ia mewarisi sendiri dan tidak ada bersamanya anak laki-laki
- b. Mendapat bagian $\frac{2}{3}$ apabila anak perempuan tersebut terdiri dari lebih dari satu orang dan tidak bersama dengan anak laki-laki
- c. Menjadi ashabah bi al-ghair apabila ia bersama dengan anak laki-laki dengan ketentuan anak laki-laki mendapat bagian dua kali dari anak perempuan

3. Kedudukan saudara dalam waris

Kedudukan saudara dalam kewarisan menurut ahlussunah dapat terhijab oleh ahli waris lain yang mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan pewaris dalam garis keturunan keatas dan kebawah. Ketentuannya yakni jika saudara laki-laki kandung terhijab oleh anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki dan ayah, sedangkan saudara perempuan sekandung terhijab oleh anak laki-laki dan cucu laki-laki dari anak laki-laki³⁰.

²⁸Rahayu, *Kedudukan Anak Perempuan dalam Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat Besemah (Studi kasus di desa Bumi Agung kecamatan Dempo Utara kota Pagalaran)*, skripsi, (Palembang, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2017), diakses pada tanggal 6 Oktober 2019.

²⁹M. Anshary MK, *Hukum Kewarisan dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013), 129.

³⁰A. Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 117.

Ketentuan lengkap mengenai saudara dalam kewarisan adalah sebagai berikut:

a. Saudara laki-laki sekandung

Saudara laki-laki sekandung merupakan ahli waris yang mendapat harta waris setelah dzawil furudh menerima bagiannya masing-masing. Saudara laki-laki sekandung termasuk kedalam ashabah bin-nafsi. Adapun ketentuannya sebagai berikut³¹:

1. Mendapat semua ashabah jika pewaris tidak meninggalkan ahli waris lain selain saudara laki-laki sekandung
2. Mendapat dua bagian lebih banyak dari saudara perempuan sekandung apabila mewarisi secara bersamaan dengan saudara perempuan sekandung.
3. Menjadi muqasamah jika bersama dengan kakek.
4. Tidak mendapat harta waris jika si pewaris meninggalkan anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki dan bapak.

b. Saudara perempuan sekandung

Bagian waris dari saudara perempuan sekandung adalah sebagai berikut³²:

1. Mendapat $\frac{1}{2}$ apabila sendiri dan tidak ada bapak, anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan saudara laki-laki sekandung.
2. Mendapat $\frac{2}{3}$ apabila terdiri dari lebih satu orang dan tidak ada bapak, anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan saudara laki-laki sekandung

³¹Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, 102.

³²Syuhada' Syarkun, *Menguasai Ilmu Fara'idh*, (Jakarta: Pustaka Syarkun, 2016), 51.

3. Menjadi ashabah bi al-ghair apabila ia bersama dengan saudara laki-laki sekandung atau kakek, dan tidak ada anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan bapak
4. Menjadi ashabah ma'a al-ghair jika ada anak perempuan atau cucu perempuan dan tidak terdapat anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki dan bapak
5. Tidak mendapat bagian waris jika terdapat anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan bapak (mahjub)

c. Saudara laki-laki seayah

Saudara laki-laki seayah merupakan ashabah bi al-nafsi, sehingga ketentuannya dalam kewarisan adalah sebagai berikut³³:

1. Mendapat semua ashabah jika pewaris tidak meninggalkan ahli waris lain selain saudara laki-laki seayah
2. Mendapat dua bagian lebih banyak dari saudara perempuan seayah apabila mewarisi secara bersamaan dengan saudara perempuan seayah.
3. Menjadi muqasamah jika bersama dengan kakek.
4. Tidak mendapat harta waris jika si pewaris meninggalkan anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, bapak, dan saudara laki-laki sekandung.

d. Saudara perempuan seayah

Ketentuan waris saudara perempuan seayah adalah sebagai berikut³⁴:

1. Mendapat $\frac{1}{2}$ apabila seorang dan tidak ada bapak, anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, saudara laki-laki sekandung, dan saudara laki-laki seayah.

³³Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, 107.

³⁴Syuhada' Syakrun, *Menguasai Ilmu Fara'idh*, 53.

2. Mendapat $\frac{2}{3}$ apabila terdiri lebih dari satu orang dan tidak ada bapak, anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, saudara laki-laki sekandung, dan saudara laki-laki seayah
 3. Mendapat $\frac{1}{6}$ apabila bersama dengan seorang saudara perempuan sekandung dan tidak ada bapak, anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, saudara laki-laki sekandung, dan saudara laki-laki seayah.
 4. Menjadi ashabah bi al-ghair jika bersama dengan saudara laki-laki seayah dan tidak ada bapak, anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan saudara laki-laki sekandung
 5. Menjadi ashabah ma'a al-ghair jika ada anak perempuan atau cucu perempuan dan tidak ada bapak, anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan saudara laki-laki sekandung
 6. Tidak mendapat harta waris jika ada bapak, anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, saudara laki-laki sekandung, dan lebih dari seorang saudara perempuan sekandung
- e. Saudara laki-laki seibu

Ketentuan bagian waris saudara laki-laki seibu adalah sebagai berikut³⁵:

1. Mendapat $\frac{1}{6}$ jika terdiri dari seorang dan tidak ada anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dari anak laki-laki, bapak dan kakek
2. Mendapat $\frac{1}{3}$ jika terdiri lebih dari seorang dan tidak ada anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dari anak laki-laki, bapak dan kakek

³⁵Syuhada' Syakrun, *Menguasai Ilmu Fara'idh*, 57.

3. Menjadi tidak mendapat waris jika terdapat anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dari anak laki-laki, bapak dan kakek

f. Saudara perempuan seibu

Bagian waris bagi saudara perempuan seibu adalah sebagai berikut³⁶:

1. Mendapat $\frac{1}{6}$ jika terdiri dari seorang dan tidak ada anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dari anak laki-laki, bapak dan kakek
2. Mendapat $\frac{1}{3}$ jika terdiri lebih dari seorang dan tidak ada anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dari anak laki-laki, bapak dan kakek
3. Menjadi tidak mendapat waris jika terdapat anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dari anak laki-laki, bapak dan kakek
4. Pendapat Ulama tentang kewarisan anak perempuan bersama saudara

Kewarisan anak perempuan bersama dengan saudara terdapat dalam surat An-Nisa ayat 12 yang berbunyi:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ
 ۚ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَهِنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ
 فَلَهُنَّ الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ ۚ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلًّا لَّهُ أَوْ امْرَأَةٌ
 وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي
 الثُّلُثِ مِنْ ۚ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ ۚ (النساء)

(١٢ :

Artinya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang

³⁶Syuhada' Syakrun, *Menguasai Ilmu Fara'idh*, 57.

ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau dan sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutanghutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibutu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun³⁷.

Kemudian dalam surat An-Nisa ayat 176 Allah berfirman

يَسْتَفْتُونَكَ ۚ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَارَثَةٌ فَأُولَٰئِكَ شِئْنٌ مَّا تَرَكَ ۚ
وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَتِ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشُّرْطَانِ ۚ وَإِنْ كَانَتْ ثَلَاثًا
رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (النساء : ١٧٦)

Artinya: "Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwakepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjamahannya*. 117.

*(hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu*³⁸.

Kedua ayat tersebut membahas tentang kalalah, yakni meninggalnya seseorang dimana orang tersebut tidak memiliki atau meninggalkan anak. Pemaknaan kata walad pada ayat diatas, terdapat beberapa perbedaan pendapat dikalangan ulama. Umar bin khattab berpendapat bahwa kalalah adalah orang yang meninggal dunia dan tidak memiliki anak, kemudian pendapat tersebut beliau tarik kembali karena berbeda pendapat dengan Abu Bakar. Abu Bakar berpendapat jika kalalah ialah meninggalnya seseorang dan tidak memiliki ayah dan anak³⁹. Perbedaan pemahaman makna tersebut menimbulkan implikasi hukum yang berbeda dalam kedudukan warisan anak perempuan bersama dengan saudara, beberapa pendapat mengenai pemaknaan kata walad pada kalalah adalah sebagai berikut:

a. Pendapat jumhur ulama

Pendapat Abu Bakar diikuti oleh Jumhur Ulama, sehingga Jumhur ulama berpendapat bahwa kalalah adalah orang meninggal dunia dan tidak memiliki ayah dan anak laki-laki. Makna walad diartikan sebagai anak laki-laki saja. Sehingga yang bisa menjadi hijab bagi kewarisan bersama saudara hanyalah anak laki-laki saja, sedangkan anak perempuan tidak memiliki kekuatan untuk menghijab saudara. Dalam kewarisan anak perempuan bersama saudara, saudara memiliki kedudukan untuk mendapatkan warisan karena tidak terhalang oleh anak perempuan.

38 Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT Karya Toha Putera, 1995), 153.

39 Anshary MK, *Hukum Kewarisan Islam dalam teori dan praktek*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 113.

Pendapat dari Jumhur Ulama mengacu kepada dua hal yakni:

1. Penggunaan kata walad secara urf dalam kehidupan dan kebiasaan sehari-hari adat bahasa arab memiliki arti sebagai anak laki-laki, bukan sebagai anak perempuan, meskipun dalam penggunaan bahasa dan syar'i mengartikan kata walad sebagai anak laki-laki dan anak perempuan. Namun secara harfiah dan penggunaan kata walad dalam adat jahiliyah mengartikannya secara umum sebagai anak laki-laki. Sehingga mendorong ulama jumhu untuk menggunakan pemakaian walad sebagai anak laki-laki.
2. Hadits nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud tentang pembagian warisan untuk kasus anak perempuan, cucu perempuan, dan saudara perempuan. Ibnu Mas'ud berkata: Aku akan memutuskan sesuai dengan yang diputuskan Rasulullah SAW: anak perempuan mendapatkan separoh, anak perempuan dari anak laki-laki mendapat seperenam untuk menyempurnakan dua pertiga, sedang sisanya untuk saudara perempuan. Pada hadits tersebut dijelaskan bahwa saudara perempuan dapat mendapat waris bersama dengan anak perempuan dengan ashabah ma'al ghairihi. Hadits tersebut menjelaskan pula bahwa anak perempuan tidak menjadi penghalang warisan bagi saudara perempuan.

Selanjutnya Jumhur Ulama memberikan batasan tentang saudara yang tidak terhibab oleh anak perempuan. Mereka berpendapat bahwa anak laki-laki dapat menjadi penghalang warisan bagi semua saudara dalam segala hubungan. Sedangkan anak perempuan tidak dapat menjadi penghalang warisan bagi saudara kandung, dan saudara seayah, tetapi bisa menjadi hibab bagi saudara seibu. Hal

tersebut dikarenakan posisi saudara seibu dalam kewarisan hanya memiliki hubungan dengan pewaris melalui jalur ibu saja⁴⁰.

b. Pendapat ulama Syiah

Ulama Syiah mengatakan bahwa kalalah merupakan orang yang meninggal dunia tanpa meninggalkan anak dan ayah. Namun pengertian anak terlepas dari anak laki-laki ataupun perempuan, kemudian segala keturunan baik laki-laki ataupun perempuan seterusnya tanpa membedakan jenis kelamin. Ulama Syiah tidak terpengaruh oleh hadits Ibnu Mas'ud seperti pendapatnya Jumah Ulama. Sejak awal Ulama Syiah berpendapat bahwa kata walad tidak membedakan antara anak laki-laki dan perempuan, kecuali dalam hal yang ditetapkan bahwa bagian anak laki-laki dua kali bagiannya anak perempuan. Selain hal tersebut tidak ada perbedaan dalam memaknai kata walad, baik dari kedudukan maupun kekuatan untuk menjadi penghalang warisan ahli waris yang lain.

Mereka berpendapat, anak perempuan termasuk dalam artian walad, sehingga pengertian kalalah adalah orang yang meninggal dan tidak terdapat anak laki-laki dan anak perempuan, sehingga pengertian tersebut sesuai dengan arti bahasa dan syariat. Sehingga ulama Syiah tidak terpeka pada pemaknaan secara aurf⁴¹. Anak perempuan kemudian memiliki kedudukan dan kekuatan yang setara dengan anak laki-laki untuk menjadi hijab bagi saudara.

⁴⁰AmirSyarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), 57-59.

⁴¹AmirSyarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 162.

c. Pendapat Zhahiri

Zahiri memiliki pendapat yang sama dengan Jumhur Ulama tentang anak perempuan tidak dapat menghijab saudara laki-laki, namun mereka juga sependapat dengan ulama Syiah dalam hal anak perempuan dapat menghijab saudara perempuan. Hal ini mengandung arti bahwa Zhahiri tidak menerima Hadits yang berasal dari Ibnu Mas'ud, dan tidak pula menerima bahwa anak perempuan memiliki kedudukan yang sama dengan anak laki-laki dalam hal menghijab saudara. Sehingga Zhahiri berpendapat bahwa makna kata walad dalam ayat tersebut adalah anak laki-laki saja⁴².

d. Pendapat Ibnu Abbas

Ibnu Abbas berpendapat bahwa kalalah merupakan orang yang meninggal dunia dan tidak meninggalkan anak dan ayah, kemudian Ibnu Abbas berpendapat juga bahwa makna kata walad tersebut mencakup kepada anak laki-laki dan juga anak perempuan. Alasannya adalah kata walad dan juga yang memiliki kesamaan dengannya dipakai dalam Al-Quran bukan hanya untuk anak laki-laki saja tetapi juga digunakan untuk anak perempuan. Seperti yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 11 dimana Allah berfirman menggunakan kata awlad yang merupakan kata jamak dari walad, yang artinya: Allah mewajibkan kamu tentang awlad (anak-anak kamu), buat seorang anak laki-laki seperti bagian dua anak perempuan. Kata awlad pada ayat tersebut mencakup kepada anak laki-laki dan juga anak perempuan. Sebagaimana pada ayat tersebut terhadap pemaknaan kata walad, maka

⁴²AmirSyarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*. 162-163

kata walad pada ayat 176 pada surat An-Nisa juga menurut Ibnu Abbas mencakup pada pemaknaan anak laki-laki dan juga anak perempuan⁴³.

Maka dari itu, menurut Ibnu Abbas bahwa anak perempuan dapat menghibah kewarisan saudara perempuan. Beliau tidak menjadikan saudara perempuan sebagai ashabah bagi anak perempuan. Pendapat ini kemudian dipegang oleh Abu Daud dan kelompoknya dan sekelompok ulama lainnya. Argumentasi mereka adalah firman Allah ayat 176 surat A-Nisa yang berarti: Jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Dalam hal ini saudara perempuan tidak dapat mewarisi kecuali jika orang yang meninggal dunia tersebut tidak mempunyai anak, baik itu anak laki-laki ataupun anak perempuan.

Ibnu Abbas juga menyampaikan sabda Rasulullah SAW mengenai sisa harta setelah diambil bagian untuk ahli waris yang berhak menerima harta warisan berdasarkan furudun muqaddarah yang telah ditetapkan oleh Allah, sisa dari harta warisan tersebut menurut beliau dibagikan kepada orang yang berhak menerima ashabah dan berjenis kelamin laki-laki, dan hanya terbatas kepada laki-laki saja. Dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, beliau bersabda

الحقو الفرائض باهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر

Artinya: Berikan bagian waris yang telah ditentukan bagian-bagiannya kepada mereka yang berhak, kemudian apa yang sisa maka diperuntukkankerabat paling dekat yang laki-laki

⁴³Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: Kencana, 2010), 303.

Sehingga dari Hadits diatas dapat disimpulkan bahwa Ibnu Abbas berpendapat bahwa anak perempuan dapat menghijab saudara perempuan dari pewaris, namun tidak dapat menghijab kewarisan saudara laki-laki.

e. Pendapat Hazairin

Hazairin berpendapat bahwa kalalah yaitu seorang meninggal dunia dengan tidak ada baginya walad. Makna walad pda ayat tersebut adalah setiap anak, boleh anak laki-laki dan boleh juga anak perempuan. Sehingga pengertian kalalah yakni keadaan seseorang yang meninggal dunia dan tidak memiliki seorang anak pun, baik anak tersebut laki-laki, maupun anak perempuan. Jika dihubungkan dengan arti mawali, maka arti kalalah selengkapny adalah keadaan seorang yang meninggal punah yak bermakna meninggal dengan tidak memiliki keturunan. Dalam sistem bilateral yang dianut beliau maka keturunan berarti setiap orang di garis keturunan di bawah, tidak peduli apakah garis keturunan tersebut melalui laki-laki ataupun perempuan.

Menurut beliau, dasar perbedaan pembagian pada ayat 12 dan 176 surat An-Nisa bukanlah karena perbedaan macam hubungan persaudaraan, namun karena keadaan yang lain yakni mengenai orangtua si pewaris. Beliau menafsirkan kalalah dalam ayat 12 sebagai saudara ketika masih ada ayah. Sedangkan pada ayat 176 dimaksudkan untuk menentukan bagian saudara dalam keadaan ayah pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu, disamping tidak meninggalkan keturunan⁴⁴.

⁴⁴Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Qur'an dan Hadits*, (Jakarta: Tinta Mas, 1982), 54-55.

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Putusan Hakim Nomor 46/Pdt.P/2013/Ms.Sgi Dan 90/Pdt.P/2017/Pa.Bjb

Putusan nomor nomor 46/Pdt.P/2013/Ms.Sgi dan 90/Pdt.P/2017/Pa.Bjb membahas tentang penetapan ahli waris. Putusan keduanya terdapat permasalahan yang sama yakni penetapan ahli waris yang terdiri dari anak perempuan bersama dengan saudara. Saudara yang dimaksud adalah saudara dari pewaris sehingga dalam artian paman atau bibi dari ahli waris perempuan tersebut. Adapun isi dari putusan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Putusan nomor 46/Pdt.P/2013/Ms.Sgi

Putusan nomor 46/Pdt.P/2013/Ms.Sgi diajukan surat permohonannya tanggal 16 Mei 2013, kemudian diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Syari'ah Sigli yang dipimpin oleh hakim Arif Irhami, S.Hi., M.Sy sebagai ketua majelis dan diikuti oleh Zulkifli Firdaus, S.Hi dan Achmad Fikri Oslami, S.Hi., M.Hi sebagai hakim anggota dengan panitera pengganti Kamariah, S.H. Putusan tersebut

terdiri dari empat orang pemohon yakni satu anak perempuan kandung dan tiga orang saudara perempuan kandung.

Permohonan tersebut bermula dikarenakan pada hari sabtu tanggal 12 Januari 2013 telah meninggal dunia ibu kandung pemohon I, adik kandung pemohon II,III,dan IV di Gampong Paya, Kecamatan Pidie dengan meninggalkan ahli waris satu anak kandung dan tiga orang saudara perempuan kandung. Disebutkan bahwa almarhum pernah menikah dan suaminya telah meninggal pada tanggal 16 Mei 2010, pernikahannya dikaruniain dua orang anak dimana satu orang anaknya telah meninggal terlebih dahulu

Selain masalah pembagian harta warisan, pemohon II juga ingin menjadi wali untuk mengampu anak perempuan almarhum. Pemohon II merupakan orang yang dekat dengan anak kandung almarhum sehingga paling memungkinkan untuk menjadi wali pengampu untuk bertindak secara hukum untuk dan atas nama anak kandung almarhum dalam mengurus segala kebutuhannya.

2. Putusan nomor 90/Pdt.P/2017/Pa.Bjb

Sebagaimana putusan nomor 46/Pdt.P/2013/Ms.Sgi, putusan nomor 90/Pdt.P/2017/Pa.Bjb juga merupakan perkara yang sama dimana perkara tersebut membahas tentang pembagian warisan dimana terdapat ahli waris anak perempuan bersama dengan saudara. Perkara dengan nomor register 90/Pdt.P/2017/Pa.Bjb berdasarkan surat permohonan tanggal 23 Mei 2017. Diperiksa dan diadili oleh majelis hakim Pengadilan Agama Banjarbaru dimana Mohd Anton Dwi Putra sebagai ketua majelis, serta H. Edi Hudiata, Lc., M.H dan M. Natsir Asnawi, S.Hi., M.H sebagai hakim anggota.

Pemohon dalam perkara tersebut yakni isteri, tiga orang anak perempuan kandung, dan dua orang saudara laki-laki kandung dari almarhum. Adapun dalil-dalil permohonan yang diajukan dalam perkara tersebut yakni para pemohon terdiri dari isteri, anak-anak perempuan kandung, dan saudara laki-laki kandung. Kemudian pemohon I menikah dengan almarhum tanggal 17 Mei 1992 berdasarkan kutipan akta nikah nomor B184/29/V/1992 tanggal 23 Mei 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Martapura kabupaten Banjar.

Dari pernikahan tersebut keduanya dikaruniai 3 orang anak perempuan dimana ketiganya masih hidup sepeninggalan dari almarhum. Ayah dari almarhum menikah dengan ibu almarhum dan dikaruniai dengan 3 orang anak laki-laki, termasuk almarhum dan dua orang saudara kandung laki-lakinya. Almarhum meninggal pada tanggal 14 April 2017 karena sakit yang diderita sebagaimana akta kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Banjarbaru nomor 6372-KM-19042017-0008 tanggal 20 April 2017. Ayahkandung dari almarhum telah meninggal dunia pada tahun 2007 dan ibu kandung almarhum telah meninggal dunia pada tahun 2000. Ketika almarhum meninggal dunia ia meninggalkan ahli waris yakni isteri, tiga orang anak perempuan kandung, dan dua orang saudara laki-laki kandung.

B. Paradigma Hakim dalam Putusan Nomor 46/Pdt.P/2013/Ms.Sgi Dan 90/Pdt.P/2017/Pa.Bjb

Walaupun memiliki permasalahan yang sama, yakni tentang warisan anak perempuan bersama dengan saudara, kedua putusan tersebut memutuskan hal yang berbeda dan memiliki paradigma yang berbeda pula dalam memutuskan

perkara tersebut. Adapun paradigma yang digunakan dalam putusan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Putusan Nomor 46/Pdt.P/2013/Ms.Sgi

Hakim memberikan pertimbangan berdasarkan keadaan dimana anak perempuan bersama dengan saudara menjadi ahli waris, dengan menggunakan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 86/K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 184/K/AG/1995 tanggal 30 September 1995. Kemudian ketentuan pasal 174 ayat (2) berbunyi:

“Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda⁴⁵.”

Sehingga majelis hakim berpendapat selama masih ada anak kandung, baik itu laki-laki ataupun perempuan dan atau semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanyalah anak, ayah, ibu, suami atau istri, maka saudara kandung yang memiliki hubungan darah dengan perawaris menjadi tertutup atau terhibab. Kemudian berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 176 juga menjelaskan tentang bagian ahli waris yang berbunyi sebagai berikut:

يَسْتَفْتُونَكَ ۚ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنْ امْرُؤٌ اهْلَكَ لَيْسَ لَهُ ۖ أُخْتُ فَلَهُ نِصْفُ مَآتَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَتِ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثُ ۚ إِنْ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (النساء

(١٧٦ :

⁴⁵Kompilasi Hukum Islam pasal 174.

Artinya: "Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwakepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu"⁴⁶.

Majelis hakim kemudian mengutip ayat tersebut berdasarkan pendapat Ibnu Abbas yakni jika orang yang meninggal dunia tidak mempunyai anak, dalam konteks ini yang dimaksud adalah anak kandung baik laki-laki maupun perempuan, maka saudara perempuan kandung mendapatkan bagian setengah harta waris yang ditinggalkan. Sehingga mafhum mukhallafah dari ayat tersebut adalah jika orang yang meninggal dunia memiliki anak kandung, baik itu laki-laki ataupun perempuan maka saudara perempuan itu tidak mendapatkan bagian dari harta waris yang ditinggalkan oleh pewaris. Berdasarkan pertimbangan yang telah disebutkan berikut maka majelis hakim berpendapat bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah anak perempuan kandung, sementara para pemohon yang berupa saudara perempuan kandung menjadi terhibab dan tidak mendapatkan warisan dari pewaris.

Pada putusan tersebut paradigma yang digunakan oleh hakim berdasarkan pada mazhab Syiah yang menganggap kedudukan anak perempuan setara dengan anak laki-laki. Mazhab Syiah berpendapat selama adanya anak, terlepas anak

⁴⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjamahannya*, (Semarang: PT Karya Toha Putera, 1995), 153.

tersebut laki-laki maupun perempuan, maka menjadikan saudara terhalang untuk mendapatkan warisan. Sehingga pada putusan tersebut dimungkinkan dengan adanya anak perempuan yang ditinggalkan oleh almarhum, memiliki kekuatan dalam, menghibab kewarisan saudara bersama dengan anak perempuan.

2. Putusan nomor 90/Pdt.P/2017/Pa.Bjb

Kemudian majelis hakim memberikan putusan atas perkara tersebut dengan pertimbangan Al-Quran surat An-Nisa ayat 11 dan 12 dimana menjadi pokok dalam penetapan ahli waris yang berbunyi sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ الْإُنثَىٰ ۖ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ أَبَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ ۚ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ زَيْنٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ ۚ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (النساء: ١١)

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat

(banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ
 ۚ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ
 فَلَهُنَّ الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ ۚ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلًّا لَّهُ أَوْ امْرَأَةٌ
 وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي
 الثُّلُثِ مِنْ ۚ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

(النساء : ١٢)

Artinya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau dan sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibuitu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun⁴⁷.

Dalam kasus warisan anak perempuan bersama dengan saudara, sebagaimana perkara tersebut, memiliki dua pandangan yang berbeda. Pandangan jumhur ulama. Jumhur ulama mengartikan makna walad secara harfiah yakni anak

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. 117.

laki-laki, tidak mencakup anak perempuan. Dalam hal tersebut terjadi pada zaman nabi Muhammad S.A.W dimana Nabi Muhammad S.A.W menetapkan bagian dua pertiga kepada dua orang anak perempuan kandung dan sisanya diberikan kepada saudara kandung dari pewaris, hal tersebut terdapat dalam hadits Ibnu Katsir Al-Dimasyqi sebagai berikut:

روى أصحاب السنن إلا النسائي عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع - رضي الله عنه - بابنتيها من سعد إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع، قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ جميع ما ترك أبوهما، فلم يدع لهما مالا، ولا تنكحان إلا ولهما مال، وفي رواية: وإن المرأة لا تنكح إلا على مالها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يقضي الله في ذلك، قال: ونزلت سورة النساء: "يوصيكم الله في أولادكم"، وفي رواية: فنزلت آية الميراث، فبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى عمهما فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين، وأعط أمهما الثمن، وما بقي فهو لك. قال الترمذي: هذا حديث صحيح، وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي وسكت عنه الحافظ في الفتح وحسنه الألباني.

Artinya: Ashab al-Sunan selain al-Nasa'i meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah (r.a), beliau berkata, 'Istri Sa'ad bin al-Rabi' datang membawa kedua anak perempuannya hasil perkawinannya dengan Sa'ad bin al-Rabi'i, menghadap Rasulullah (s.a.w) berkata, 'Wahai Rasulullah, 'Dua gadis ini merupakan anak perempuan Sa'ad bin al-Rabi'. Ayah mereka berdua mati syahid ketika berperang bersamamu di Uhud. Sekarang paman kedua anak perempuan ini datang mengambil seluruh harta peninggalan ayah mereka. Tidak ada sedikit pun harta peninggalan yang diserahkan kepada kedua keponakannya ini padahal keduanya tidak bisa menikah melainkan ada hartanya'. Dalam satu riwayat, 'padahal wanita itu tidak dinikahi melainkan karena hartanya'. Mendengar itu, Rasulullah (s.a.w) bersabda, 'Allah akan memberi keputusan dalam masalah ini. Lalu turunlah Surah al-Nisa' ayat 11 yang menyebutkan ketentuan waris.

Berdasarkan ayat itu, baginda mengirimkan utusan untuk menghadap paman kepada kedua anak perempuan tersebut yang isi pesannya adalah: 'Berilah dua pertiga bagian untuk dua anak perempuan Sa'ad bin al-Rabi' itu, seperdelapan bagian untuk ibu mereka berdua sedangkan sisanya adalah milikmu (saudara Sa'ad bin al-Rabi')'⁴⁸.

Dalam hadits tersebut dijelaskan bahwa dengan adanya anak perempuan kandung tidak menghalangi saudara pewaris untuk menerima bagian warisnya. Anak perempuan tetap mendapat bagiannya dua pertiga karena jumlah anak perempuan lebih dari seorang, kemudian ibu mereka dalam konteks tersebut adalah istri pewaris mendapatkan seperdelapan bagian, kemudian sisanya diambil oleh saudara. Hadits tersebut yang menjadi dasar dari pandangan sebagian ulama mengenai warisan anak perempuan bersama dengan saudara.

Pendapat yang lain mengatakan anak perempuan memiliki kedudukan yang sama dengan anak laki-laki, sehingga anak perempuan juga memiliki kekuatan untuk menghalangi saudara dalam mendapatkan harta warisan. Hal tersebut merupakan pendapat dari Ibnu Abbas yang memaknai kata *walad* dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 176 yang berbunyi:

يَسْتَفْتُونَكَ ۚ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكُلِّ ۚ لَئِنْ أَمْرُ أَهْلِكَ لَيْسَ لَهُ ۖ أُخْتُ فَلَهُ نِصْفُ مَآثَرِكَ ۚ وَهُوَ يَرْتُهَا ۖ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَتِ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثُ ۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (النساء

(١٧٦ :

Artinya: "Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu

⁴⁸ Ibnu Katsir Al-Daimasyqi *Tafsir AlQuran Al- 'Ahzhim*, 197.

seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu⁴⁹.

Kata walad dalam ayat tersebut oleh Ibnu Abbas dimaknai dengan anak laki-laki dan anak perempuan, sehingga anak perempuan memiliki kekuatan untuk menghalangi saudara dalam menerima harta waris baik itu saudara kandung, saudara seayah, dan juga saudara seibu. Pendapat tersebut kemudian digunakan oleh yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 86/K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 184/K/AG/1995 tanggal 30 September 1995. Pada yurisprudensi tersebut disebutkan bahwa saudara tidak memiliki hak untuk mendapatkan warisan selama masih terdapat anak yang menjadi ahli waris, baik itu anak laki-laki kandung maupun anak perempuan kandung.

Majelis hakim memberitahukan kepada para pihak tentang perbedaan kedua pendapat tersebut. Dengan adanya perbedaan pendapat tersebut maka, para pihak menegaskan memilih pendapat pertama yang berpendapat bahwa anak perempuan tidak menghalangi saudara untuk mendapatkan harta warisan, sehingga saudara memiliki hak untuk memperoleh bagian waris. Para pihak menyatakan kerelaannya dalam hal tersebut, terlebih lagi saudara pewaris termasuk dari golongan yang kurang mampu.

⁴⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 153.

Kemudian majelis hakim memberikan pertimbangan yang lain dalam perkara tersebut. Majelis hakim melihat bagaimana perilaku yang diberikan oleh saudara pewaris kepada pewaris semasa hidupnya. Jika saudara memberikan peranan penting kepada pewaris baik berupa bantuan finansial ataupun kepedulian kepada pewaris, maka saudara menjadi mungkin mendapatkan bagian dari warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.

Adapun jika saudara tersebut tidak memberikan kontribusi dalam kehidupan pewaris, yakni saudara tidak menjalankan kewajibannya dalam perannya sebagai saudara, terlebih saat dimana pewaris meninggal. Saudara tidak menjalankan kewajibannya dalam mengurus pewaris, dan hal tersebut hanya dilakukan oleh anak-anak pewaris, maka menjadi mungkin anak tersebut menjadi penghalang bagi saudara dalam mendapatkan harta warisan dari pewaris. Hal ini merupakan keseimbangan antara hak dan kewajiban yang dilakukan.

Berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, terlebih dengan adanya kerelaan dari anak perempuan pewaris, maka majelis hakim menetapkan bahwa anak perempuan kandung tidak memiliki kekuatan untuk menghibah saudara mendapatkan warisan. Sehingga yang berhak menjadi ahli waris dan mendapatkan bagian warisan dari pewaris adalah isteri, tiga orang anak perempuan kandung, dan dua saudara laki-laki kandung.

Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada perkara nomor 90/Pdt.P/2017/PA.Bjb memutuskan berdasarkan asas keadilan yang terjadi. Hal tersebut terlihat pada saat persidangan anak perempuan mengatakan bahwa saudara merupakan golongan orang yang tidak mampu. Selain itu pula saudara

tersebut telah menjalankan tugasnya sebagai saudara dari almarhum semasa hidupnya,terlebih lagi pengurusan jenazah almarhum pada saat meninggalnya. Oleh karena hal tersebut hakim berpendapat jika saudara memiliki hak untuk mendapatkan warisan dan tidak terhalang oleh adanya anak perempuan. Putusan itu juga sesuai dengan pendapat ulama jumhur yang menganggap saudara berhak untuk mendapatkan harta warisan jika almarhum hanya meninggalkan anak perempuan, dimana kedudukan tidak sama dengan anak laki-laki yang memiliki kekuatan untuk menjadi penghalang bagi saudara untuk mendapatkan warisan.

C. Analisis terhadap Perbedaan Putusan Nomor 46/Pdt.P/2013/MS.Sgi dan 90/Pdt.P/2017/PA.Bjb

Putusan nomor 46/Pdt.P/2013/MS.Sgi dan 90/Pdt.P/2017/PA.Bjb membahas tentang perkara penetapan ahli waris. Keduanya terdapat para pemohon yang terdiri dari anak perempuan kandung dan saudara kandung yang ingin ditetapkan sebagai ahli waris dan mendapat bagian dari harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Namun kedua putusan tersebut memiliki amar putusan yang berbeda, walaupun perkara waris anak perempuan bersama dengan saudara bukanlah perkara yang baru terjadi.

Setidaknya terdapat yurisprudensi Mahkamah Agung yang telah memutus perkara yang serupa. Dalam yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut diputuskan bahwa anak kandung, baik itu laki-laki ataupun perempuan bisa menjadi hijab bagi saudar, sehingga saudara menjadi terhalang kedudukannya dalam mendapatkan warisan selama ada anak, terlepas dari anak tersebut laki-laki atau

perempuan. Beberapa putusan Mahkamah Agung yang menjadi yurisprudensi adalah sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 86/K/AG/1994 tanggal 27 juli 1995, dalam putusannya, Mahkamah Agung berpendapat,

“Bahwa Mahkamah Agung berpendapat selama masih ada anak baik laki-laki maupun perempuan maka hak waris dari orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris kecuali orangtua, suami atau isteri, menjadi tertutup atau terhijab⁵⁰.”

2. Putusan Mahkamah Agung nomor 184/K/AG/1995 tanggal 30 September 1996, dalam putusannya Mahkamah Agung berpendapat,

“Bahwa dengan adanya anak perempuan dari pewaris terhijab oleh Tergugat asal I oleh karenanya penggugat-penggugat asal tidak berhak atas harta warisan⁵¹.”

Yurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum yang digunakan dalam hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara. Disamping yurisprudensi terdapat beberapa sumber hukum lainnya yang digunakan oleh peradilan agama. Sumber hukum tersebut terbagi menjadi dua, yakni:

1. Sumber hukum materil

Sumber hukum materil merupakan sumber yang terdapat materi atau bahan hukum bisa diambil. Adapun sumber hukum materil peradilan agama adalah:

- a. Al-Quran
- b. Hadits
- c. Ijma’
- d. Qiyas

⁵⁰Putusan Mahkamah Agung Nomor 86/K/AG/1994.

⁵¹Putusan Mahkamah Agung nomor 184/K/AG/1995.

- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Perwakafan Tanah Milik
- h. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf
- i. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 28 Tahun 1977
- j. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim
- k. Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
- l. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- m. Kompilasi Hukum Islam⁵².

2. Sumber hukum formil

Sumber hukum formil merupakan sumber diambilnya hukum dengan bentuknya atau cara terjadinya, sehingga dapat menjalankan hukum yang ada. Adapun hukum formil yang digunakan oleh Peradilan Agama menurut pasal 54 Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sama dengan hukum acara yang digunakan oleh Peradilan Umum, kecuali hal-hal yang secara khusus diatur dalam undang-undang tersebut. Adapun sumber hukum yang berlaku di ruang lingkup Peradilan Agama adalah:

- a. HIR/R.Bg
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek/BW)

⁵²Andi Intan Cahyani, *Peradilan Agama sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia*. (Alqada, 2019). 125. Diakses pada 25 Maret 2020.

- c. Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
- d. Undang-Undang nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung
- e. Yurisprudensi
- f. Doktrin
- g. Hukum Kebiasaan
- h. Peraturan Perundang-undnagan
- i. Surat edaran Mahkamah Agung⁵³.

Yurisprudensi memiliki beberapa pengertian, sebagaimana yang telah dihimpun oleh Badan Pembinaan Hukum nasional pada tahun 1991 dan 1992, diantaranya yaitu:

1. Peradilan yang tetap atau hukum peradilan
2. Ajaran hukum yang dibentuk dan dipertahankan oleh pengadilan
3. Pengumpulan yang sistematis dari keputusan Mahkamah Agung dan keputusan Pengadilan Tinggi yang diikuti oleh hakim lain dalam member keputusan pada permasalahan yang sama
4. Putusan-putusan hakim atau pengadilan yang tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi, atau putusan-putusan Mahkamah Agung sendiri yang tetap

⁵³ Abdul Manan. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkup peradilan Agama*.(Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2001). 6-9.

5. Bukan sebagai keputusan hakim ataupun rentetan dari keputusan, melainkan hukum yang dibentuk dari keputusan-keputusan hakim yang memiliki kesamaan terhadap permasalahan yang sama, seperti *ijma*.⁵⁴

Beberapa pendapat tersebut kemudian ditarik kesimpulan bahwa Yurisprudensi merupakan keputusan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung ataupun Pengadilan Tinggi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, dan digunakan oleh hakim pada peradilan dibawahnya pada suatu permasalahan yang sama. Sehingga suatu putusan dapat digunakan sebagai yurisprudensi, apabila putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang tetap setidaknya pada Peradilan Tinggi, dan atau telah dikuatkan ataupun dibantah oleh Mahkamah Agung. Yurisprudensi digunakan apabila dalam suatu perkara terdapat permasalahan atau persoalan yang sama. Namun, yurisprudensi tidak digunakan secara mentah melainkan dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam menangani perkara tersebut.

Indonesia tidak sepenuhnya menganut system civil law yang bergantung sepenuhnya kepada hukum yang berorientasi terhadap Perundang-Undangan. Indonesia juga bukan pula penganut asas the binding force of precedent, dimana putusan hakim-hakim sebelumnya memiliki kekuatan mengikat hakim yang lain pada perkara yang memiliki permasalahan yang sama. Hakim memiliki kebebasan untuk memilih mengikuti atau meninggal yurisprudensi jika yurisprudensi tersebut tidaklah sesuai dengan keadaan, tuntutan zaman serta rasa keadilan pada perkara tersebut. Namun tidak ada salahnya juga jika hakim memakai

⁵⁴Enrico Simanjuntak. *Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia*. (Jakarta: 2018). 88-89 diakses pada tanggal 28 Maret 2020.

yurisprudensi jika dirasa sesuai dengan nilai dan norma hukum serta rasa adil yang ada di masyarakat⁵⁵. Hakim harus mengedepankan rasa keadilan dan hukum yang hidup dan ada dan hidup dalam masyarakat. Sejatinya hukum adalah hukum yang hidup di masyarakat.

Mengenai kewajiban hakim untuk secara menyeluruh memeriksa dan mengadili perkara untuk memperoleh keadilan disebut dalam pasal 5 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yakni:

- 1) *“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.*
- 2) *Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.*
- 3) *Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati kode etik dan pedoman perilaku hakim⁵⁶.”*

Hakim memiliki kebebasan dan kekuasaan penuh dalam menangani perkara yang ditanganinya, disamping itu juga hakim bersifat independen, sehingga tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun dalam menanggapi setiap perkara. Hal tersebut terdapat dalam pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

- 1) *Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakimkonstitusi wajib menjaga kemadirian peradilan.*
- 2) *Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945⁵⁷.*

Putusan Mahkamah Syaria,ah Sigli dengan nomor 46/Pdt.P/2013/MS.Sgi, dalam menangani perkara terkait warisan anak perempuan bersama dengan saudara, mengikuti yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 86 K/AG/1994 dan

⁵⁵ Abdul Manan. *Penerapan Hukum Acara Perdata*, 8.

⁵⁶ Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 5.

⁵⁷ Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 3.

yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 184 K/AG/1995. Sehingga dalam amar putusannya hakim menetapkan bahwa yang menjadi ahli waris adalah anak perempuan kandung dan menghibah saudara kandung dari almarhum. Kemudian hakim juga melihat ketentuan yang tertulis dalam pasal 174 ayat (2) dalam Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

“Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda⁵⁸.”

Hakim kemudian berpendapat bahwa kedudukan anak perempuan kandung tersebut, sama dengan kedudukannya anak laki-laki. Maka selama terdapat anak, baik itu laki-laki ataupun perempuan, dan atau selama semua ahli waris ada, yang berhak mendapatkan harta warisan hanyalah anak, ayah, ibu, suami atau isteri. Saudara menjadi terhalang dalam mendapatkan waris dengan adanya anak, meskipun anak tersebut atau perempuan tetap menjadi penghalang bagi saudara untuk mendapatkan harta warisan.

Pertimbangan tersebut kemudian diperkuat oleh Al-Quran surat An-Nisa ayat 176 yang mengutip pendapat Ibnu Abbas. Jika orang yang meninggal dunia tidak memiliki anak, baik perempuan maupun laki-laki, maka saudara perempuan mendapat bagian setengah dari harta warisan. Mafhum mukhallafah dari pendapat tersebut adalah jika anak masih ada, maupun anak tersebut adalah laki-laki ataupun perempuan, maka saudara menjadi hilang atau tertutup haknya dalam mendapat waris.

Adapun putusan Pengadilan Agama Banjarbaru nomor 90/Pdt.P/2017/PA.Bjb, dalam kasus yang sama tentang kewarisan anak

⁵⁸ Kompilasi Hukum Islam pasal 174.

perempuan kandung bersama dengan saudara, memiliki amar putusan yang berbeda dengan putusan Mahkamah Syariah Sigli nomor 46/Pdt.P/2013/MS.Sgi. Bahkan putusannya tersebut berbeda dari putusan yang terdapat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 86 K/AG/1994 dan yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 184 K/AG/1995. Para hakim memiliki pandangan yang berbeda dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, walaupun permasalahan yang terjadi sama.

Hakim dalam amar putusannya menetapkan bahwa anak perempuan tidak menghalangi saudara dalam mendapatkan harta warisan, sehingga saudara mendapatkan bagian dalam menerima harta waris dari almarhum. Pada berita acara persidangan, anak perempuan kandung tersebut menyatakan keridhaan dan kerelaannya jika saudara almarhum juga mendapat bagian dari harta warisan. Kemudian dengan menimbang keadilan dan kemaslahatan hakim menetapkan untuk memberikan saudara bagian waris dan tidak menjadi terhijab dengan adanya anak perempuan.

Analisis putusan Mahkamah Syariah Sigli nomor 46/Pdt.P/2013/MS.Sgi dan putusan Pengadilan Agama Banjarbaru menurut pandangan ulama sebagaimana yang tertera pada kajian pustaka pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jumhur Ulama

Putusan Mahkamah Syariah Sigli tidak sesuai dengan pendapat dari Jumhur Ulama yang berpendapat bahwa anak perempuan tidak dapat menjadi penghalang saudara dalam menerima waris. Kalalah yang dimaksud oleh Jumhur Ulama adalah meninggalnya seseorang tanpa memiliki ayah dan anak laki-laki. Pendapat tersebut sesuai dengan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banjarbaru yang menetapkan bahwa anak perempuan tidak dapat menghalangi saudara dalam menerima waris

2. Ulama Syiah

Mahkamah Syariah Sigli memiliki pendapat yang sama dengan pendapat yang dikeluarkan oleh Ulama Syiah, dimana anak perempuan tidak dapat menghalangi bagian waris saudara. Ulama Syiah berpendapat jika anak perempuan memiliki kedudukan yang sama dengan anak laki-laki dalam menghalangi saudara untuk mendapatkan warisan. Sedangkan pendapat tersebut memiliki perbedaan dengan putusan Pengadilan Agama Banjarbaru yang menetapkan bahwa saudara tetap mendapat warisan dengan adanya anak perempuan.

3. Zahiri

Putusan Mahkamah Syariah Sigli memiliki keseusaian dengan pendapat Zahiri dimana anak perempuan dapat menghalangi saudara perempuan dalam mendapatkan warisan. Dimana dalam putusan tersebut para pihak terdiri dari anak perempuan dan saudara perempuan kandung, sehingga putusannya sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Zahiri. Sedangkan pada putusan Pengadilan Agama Banjarbaru juga terdapat persamaan dengan pendapat dari Zahiri. Zahiri

berpendapat bahwa anak perempuan tidak dapat menghalangi saudara laki-laki dalam mendapat warisan. Pada putusan Pengadilan Agama Banjarbaru pihak yang berpekara adalah istri, anak perempuan dan saudara laki-laki kandung, dan dalam penetapannya hakim berpendapat bahwa anak perempuan tersebut tidak menghalangi saudara dalam mendapat warisan.

4. Ibnu Abbas

Pendapat Ibnu Abbas mengatakan bahwa anak perempuan dapat menghijab saudara untuk medapatkan waris, namun tidak dapat menghijab kewarisan saudara laki-laki. Tentunya pendapat tersebut sesuai dengan putusan Mahkamah Syariah Sigili yang menetapkan bahwa adanya anak perempuan menjadi penghalang saudara dalam mendapatkan warisan, dimana pihak yang berperkara dalam penetapan waris tersebut adalah anak perempuan dan saudara perempuan kandung. Pendapat Ibnu Abbas tersebut juga sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Banjarbaru, dimana para pihak terdiri dari istri, anak perempuan dan saudara laki-laki kandung. Pada putusannya hakim menetapkan bahwa anak perempuan tidak menghalangi saudara untuk mendapatkan warisan.

5. Hazairin

Mahamah Syariah Sigli memiliki pendapat yang sama dengan hazairin dalam menetapkan terhalangnya bagian waris saudara bersama dengan anak perempuan. Hazairin berpendapat bahwa selama masih ada anak, terlepas anak laki-laki ataupun perempuan, dapat menjadi pengalang waris bagi saudara. pendapat tersebut memiliki perbedaan dengan putusan yang dikeluarkan oleh

Pengadilan Agama Banjarbaru yang menetapkan bahwa anak perempuan tidak dapat menghibah kewarisan saudara.

Tentunya keputusan hakim tersebut tidak melanggar syariat Islam, dan tidak pula melanggar peraturan perundang-undangan. Hakim telah melakukan segala upaya dan pikirannya untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Terlebih lagi keputusannya tetap bersandarkan kepada Al-Quran dan hadtis serta peraturan perundang-undangan. Begitu pula hakim Mahkamah Syariah Sigli juga tidak melakukan kesalahan dalam memutuskan perkara berdasarkan keputusan yurisprudensi Mahkamah Agung.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan sesuai dengan pasal 174 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa:

“Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda⁵⁹.”

Pasal tersebut menjelaskan bahwa yang berhak untuk mendapatkan warisan, jika semua ahli waris ada yakni ayah, ibu, anak, janda atau duda. Anak yang dimaksud dalam pasal tersebut menurut Kompilasi Hukum Islam mencakup anak laki-laki dan juga anak perempuan. Sehingga dapat dipahami bahwa dengan adanya anak, baik anak laki-laki ataupun anak perempuan, maka saudara menjadi terhalang untuk mendapatkan waris. Hal tersebut kemudian dijelaskan pada pasal 182 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

“Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separuh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-

⁵⁹ Pasal 174 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam

sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan⁶⁰.”

Berdasarkan pasal tersebut hakim Mahkamah Syariah Sigli menjadikannya landasan dalam memutuskan perkara tersebut. Hakim Mahkamah Syariah Sigli menyesuaikan amar putusannya sesuai dengan kewarisan yang berlaku secara umum di Indonesia. Mereka mengedepankan keadilan yang hidup dan berlaku pada masyarakat. Sehingga penerapan yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 86 K/AG/1994 dan yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 184 K/AG/1995 dianggap sesuai dan sangat tepat.

Sedangkan putusan Pengadilan Agama Banjarbaru dalam memutuskan perkaranya, melihat keadaan yang terjadi dalam persidangan. Dimana para pihak, setelah mengetahui bagiannya masing-masing, sepakat untuk berdamai dalam pembagian harta warisan tersebut. Hal tersebut tentunya terdapat dalam pasal 183 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

“Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya⁶¹.”

Pasal tersebut menjelaskan tentang terjadinya kejadian yang khusus, dimana para ahli waris dapat melakukan perdamaian serta perundingan terhadap besarnya bagian waris yang diterima. Tentunya hal itu terjadi jika tidak ada paksaan diantara para ahli waris, dan semua ahli waris menyatakan persetujuannya tanpa ada satu pihakpun yang mengalami keberatan. Pada Pengadilan Agama Banjarbaru, hakim mengutarakan adanya perbedaan pendapat mengenai kewarisan anak perempuan bersama saudara. Kemudian tanpa adanya

⁶⁰ Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam

⁶¹ Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam

paksaan para pihak setuju untuk memilih tidak terhalangnya saudara dalam mendapatkan warisan. Sehingga pengambilan putusan yang ada di Pengadilan Agama Banjarbaru merupakan sebuah kekhususan yang terjadi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka putusan hakim Mahkamah Syariah Sigli perkara nomor 46/Pdt.P/2013/MS.Sgi. lebih baik dikarenakan selain berpedoman kepada peraturan dan perundangan yang berlaku, hakim Mahkamah juga memutuskan berdasarkan sistem kewarisan yang berlaku secara umum di Indonesia. Sedangkan putusan hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada perkara nomor 90/Pdt.P/2017/PA.Bjb, terjadi dikarenakan adanya suatu kekhususan yang terjadi pada kasus tersebut, yang tidak secara umum terjadi pada masyarakat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan dari perbandingan putusan Mahkamah Syariah Sigli nomor 46/Pdt.P/2013/Ms.Sgi dan putusan Pengadilan Agama Banjarbaru nomor 90/Pdt.P/2017/PA.Bjb sebagai berikut:

1. Paradigma yang digunakan oleh hakim pada putusan Mahkamah Syariah Sigli nomor 46/Pdt.P/2013/Ms.Sgi yakni, selama masih ada anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, maka saudara menjadi terhibab atau terhalangi dalam mendapatkan harta warisan, dipertimbangkan berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 86 K/AG/1994 dan yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 184 K/AG/1995. Sedangkan putusan Pengadilan Agama Banjarbaru nomor 90/Pdt.P/2017/PA.Bjb menetapkan bahwa anak

perempuan tidak menjadi penghalang bagi saudara untuk memperoleh harta warisan. Putusan tersebut berdasarkan pertimbangan atas kerelaan anak perempuan kandung untuk memberikan harta warisan kepada saudara, terlebih saudara telah melakukan kewajibannya sebagai saudara kepada almarhum. Pandangan hakim didasarkan kepada makna walad dalam surat An-Nisa ayat 176 yang dimaknai oleh jumhur ulama dengan anak laki-laki saja. Sehingga anak perempuan tidak memiliki kekuatan untuk menghibab saudara dalam memperoleh waris.

2. Putusan Mahkamah Syariah Sigli nomor 46/Pdt.P/2013/Ms.Sgi.merupakan putusan yang lebih baik karena dalam menetapkan perkara selain berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung tetapi juga peraturan perundang-undangan yang berlaku berupa Kompilasi Hukum Islam pasal 174 ayat (2) dan pasal 182, sehingga putusan tersebut lebih relevan untuk berlaku secara umum pada masyarakat Indonesia. Adapun putusan Pengadilan Agama Banjarbaru nomor 90/Pdt.P/2017/PA.Bjb dalam menetapkan pekaranya tidak berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi lebih menekankan kepada keadilan yang terdapat dalam proses persidangan yakni saudara yang kurang mampu dari segi ekonomi dan diangkatnya saudara sebagai wali pengampu bagi anak perempuan.

B. Saran

1. Untuk para penegak hukum hendaknya lebih melihat norma dan nilai-nilai hukum serta keadilan yang hidup dalam masyarakat, walaupun dalam permasalahan suatu perkara telah memiliki yurisprudensi. Karena pada

dasarnya yurisprudensi tersebut belumlah tentu sesuai dengan keadaan masyarakat pada umumnya dan khususnya para pihak yang berperkara.

DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an&Terjemahan*, Bandung: CV. Darus Sunnah, 2015.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kompilasi Hukum Islam

Putusan Mahkamah Agung Nomor86/K/AG/1994

Putusan Mahkamah Agung nomor 184/K/AG/1995

Arikunto, Suharsimi.*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta :Rineka Cipta 2010.

Budiono,A. Rahmad.*Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Cet ke-1*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia cet ke VIII*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).

Halim,Abdul.*Hazairin dan Pemikirannya tentang Pembaharuan Hukum Keluarga dalam Islam* Penelitian Jurnal Agama, 1998.

Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Qur'an dan Hadits*, Jakarta: Tinta Mas, 1982.

Manan,Abdul.*Penerapan Hukum Acara perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015.

- Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Maruzi, Muslih. *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, Cet. ke-1 Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Kencana: Jakarta, 2010.
- Metokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009.
- MK, M. Anshary. *Hukum Kewarisan dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013.
- Muhibbin, Moh. dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam, sebagai pembaruan hukum positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Muljono, Wahyu. *Teori dan Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Maju 2008.
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Pengadilan Agama*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Rofiq, Ah. *Hukum Islam Di Indonesia*, cet. Ke-4 Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000.
- Sarmadi, A. Sukris. *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Soekamto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Syakrun, Syuhada'. *Menguasai Ilmu Fara'idh*, Jakarta: Pustaka Syarkun, 2016.
- Thalib, Sajuti. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1981.

Wahyudi, Abdullah Tri. *Hukum Acara Peradilan Agama Dilengkapi Contoh Surat-Surat Dalam Praktik Hukum Acara di Peradilan Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2018.

Cahyani, Andi Intan. *Peradilan Agama sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia*. Alqada, 2019.

Fakhrizal, Yusrizal Efa Laela. *Kewenangan Mahkamah Syari'ah di Aceh dihubungkan dengan Sistem Peradilan di Indonesia*, Pustaka Unpad, 2014.

Fatoni, Yudan. *Putusan Pengadilan Agama Bangil No. 538/Pdt.G/PA.Bgl tentang Anak Perempuan Menghijab Saudara Laki-laki Kandung Perspektif Fiqh Indonesia*, skripsi, Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2010.

Muwahid, *Metode Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif*, Al-Hukama Juni, 2017.

Oktafiani, Nisa. *Anak Perempuan Sebagai Hijab Hirman Terhadap Kewarisan Ashabah bin Nafsih (Analisis Putusan Mahkamah Agung RI No. 86K/Ag/1994)*, skripsi, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014.

Raharjo, M. *Content Analysis Sebagai Metode Tafsir Teks: akar sejarah dan penggunaannya*. Malang, 2017.

Rahayu, *Kedudukan Anak Perempuan dalam Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat Besemah (Studi kasus di desa Bumi Agung kecamatan*

DempoUtara kota Pagalaram), skripsi, Palembang, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2017.

Simanjuntak, Enrico. *Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Jakarta: 2018.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Malang: fakultas Syari'ah, 2015.

RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS DIRI



Nama	: Arif Rahman Hakim
TTL	: Kudus, 31 Oktober 1997
Jenis kelamin	: Laki-laki
Status	: belum menikah
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Jl. Raya candi V, Malang
No. Telp	: 081250811156

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

Formal

2015 : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
 2012 – 2015 : MAN Darul Arafah Raya
 2009 – 2012 : MTs Darul Arfah Raya
 2003 – 2009 : SD Yayasan Perguruan Keluarga



Salinan

P E N E T A P A N

Nomor 46/Pdt. P/2013/MS. Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah syar'iyah Sigli yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan ahli waris dan wali pengampu antara :

PEMOHON I, umur 83 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pensiunan PNS (Pegawai Negeri Sipil), tempat tinggal di Sigli. Bertindak untuk diri sendiri dan atas nama Anak Kandung Almarhum yang masih dibawah umur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I** ;

PEMOHON II, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan PNS (Pegawai Negeri Sipil), tempat tinggal di Kabupaten Pidie Jaya. Sekarang alamat Sigli. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II** ;

PEMOHON III, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS (Pegawai Negeri Sipil), tempat tinggal di Sigli. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III** ;

PEMOHON IV, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS (Pegawai Negeri Sipil), tempat tinggal di Kabupaten Pidie. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I V**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut diatas ;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara di persidangan ;

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 16 Mei 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli dengan nomor register 46/Pdt.P/2013/MS.Sgi telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2013 telah meninggal dunia anak kandung perempuan kandung Pemohon I / adik kandung perempuan dari Pemohon II, III dan IV di Gampong Paya, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie yang bernama Almarhumah dengan meninggalkan ahli warisnya yaitu :
 - 1.1. Anak Kandung Almarhumah (anak perempuan kandung) ;
 - 1.2. Pemohon I (ayah kandung/Pemohon I) ;
 - 1.3. Pemohon II (kakak kandung perempuan/Pemohon II)
 - 1.4. Pemohon III (Kakak kandung perempuan/Pemohon III) ;
 - 1.5. Pemohon III (kakak kandung perempuan/Pemohon IV) ;
2. Bahwa, almarhumah Almarhumah pernah menikah dengan Suami Almarhumah yang telah meninggal tanggal 16 Mei 2010, perkawinan mereka punya 2 (dua) orang anak 1 (satu) orang telah meninggal dunia bernama Anak Pertama bin Suami Almarhumah, umur \pm 5 tahun, tinggal di Sigli. Sementara Suami Almarhumah telah duluan meninggal dunia daripada Almarhumah ;
3. Bahwa, almarhumah Almarhumah semasa hidupnya adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru) di unit kerja Kantor Kementerian Agama, Kota Langsa dengan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor KW.01.1/2/Kp.07.1/2158/2011 tanggal 24 Nopember 2011 ;
4. Bahwa, ibu kandung almarhumah Almarhumah yang bernama Ibu kandung Almarhumah juga telah terlebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 01 Desember 2007 ;
5. Bahwa, oleh karena Anak Kandung Almarhumah masih di bawah umur, maka untuk memenuhi maksud tersebut diperlukan wali pengampu yang dapat bertindak secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan atas nama Anak Kandung Almarhumah tersebut untuk mengurus segala kepentingannya ;

6. Bahwa, Pemohon II (Pemohon II) satu-satunya orang yang paling dekat dan paling memungkinkan menjadi wali pengampu untuk Anak Kandung Almarhumah guna bertindak secara hukum untuk dan atas nama Anak Kandung Almarhumah dalam mengurus segala kebutuhannya ;

7. Bahwa, Pemohon-Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris in untuk keperluan kepengurusan persiuan terhadap anak yang bernama Anak Kandung Almarhumah dari almarhumah Ibu kandungnya Almarhumah di PT. TASPEN Banda Aceh ;

Berdasarkan alasan yang telah Pemohon-Pemohon kemukakan di atas, maka dengan ini Pemohon-Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli kiranya dapat memeriksa dan mengadili serta memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan dan menetapkan telah meninggal dunia almarhumah Almarhumah pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2013 ;
3. Menetapkan ahli waris almarhumah Almarhumah sebagai berikut :
 1. Anak Kandung Almarhumah (anak kandung perempuan) ;
 2. PEMOHON I (ayah kandung/Pemohon I) ;
 3. PEMOHON II (kakak Kandung perempuan/Pemohon II);
 4. PEMOHON III (kakak Kandung perempuan/Pemohon III);
 5. PEMOHON IV (kakak Kandung perempuan/Pemohon IV)
3. Menetapkan Pemohon II sebagai wali Pengampu dari anak yang bernama Anak Kandung Almarhumah binti Suami Almarhumah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri-sendiri menghadap kepersidangan ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon, dan atas permohonan tersebut para Pemohon ada perubahan dan penambahan sebagai berikut :

- Pada identitas Pemohon ditambahkan nama ayah (bin) yaitu Daud ;
- Pada identitas Pemohon II ditambahkan gelar akademik A.Md ;
- Pada identitas Pemohon III ditambahkan gelar akademik S.Ag ;
- Pada identitas Pemohon IV ditambahkan gelar akademik S.K.M ;
- Ditambahkan juga pada posita nomor 4 tentang Ibu kandung almarhumah Almarhum yang telah lebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 01 Desember 2007 yang bernama Nursiah binti Abdurrahman ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia yang telah di Nazzegelling dan diberi meterai secukupnya nomor : 73/PY/IV/2013, atas nama Suami Almarhumah dan Almarhum yang dikeluarkan oleh Keuchik Sigli, tanggal 26 April 2013. Setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya diparaf dan diberi kode (P.1) ;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang telah di Nazzegelling dan diberi meterai secukupnya nomor : 75/PY/IV/2013 atas nama para Pemohon yang dikeluarkan oleh Keuchik Sigli, tanggal 30 April 2013. Setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya diparaf dan diberi kode (P.2) ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang telah di Nazzegelling dan diberi meterai secukupnya nomor : 510.000000.889 atas nama Khansa Aqila yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie, tanggal 31 Desember 2008. Setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya diparaf dan diberi kode (P.3) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi surat Keputusan Menteri Agama yang telah di Nazzegelling dan diberi meterai secukupnya nomor : KW.01.1/2/Kp.07.1/2158/2011 atas nama Almarhumah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Aceh, tanggal 24 November 2011. Setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya diparaf dan diberi kode (P.4) ;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan bukti-bukti surat tersebut di atas, para Pemohon juga telah menghadirkan alat bukti 2 (dua) orang saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tukang, jabatan Geuchik, tempat tinggal di Sigli. Telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon selaku warga Gampong ;
 - bahwa hubungan diantara para Pemohon adalah ayah dan anak ;
 - Bahwa benar Pemohon I adalah ayah kandung almh. Almarhumah, sedangkan Pemohon II sampai Pemohon IV adalah saudara kandung Alm. Almarhumah ;
 - Bahwa saksi juga kenal dengan Almh. Almarhum dan telah meninggal dunia pada tahun ini, meninggalnya di Banda Aceh dan dimakamkan di Sigli ;
 - Bahwa semasa hidupnya almh. Almarhumah pernah menikah dengan Suami Almarhumah, akan tetapi suaminya tersebut telah terlebih dahulu meninggal dunia ;
 - Bahwa almh. Almarhumah dan alm. Suami Almarhumah telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Pertama binti Suami Almarhumah dan Anak Kedua Almarhum, akan tetapi Anak Pertama telah terlebih dahulu meninggal dunia daripada almh. Almarhumah ;
 - Bahwa saksi kenal dengan para anak almh. Almarhumah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua almh. Almarhumah yang masih hidup hanya ayahnya (Pemohon I), sedangkan ibunya yang bernama Ibu Kandung Almarhumah telah lebih dahulu meninggal dunia ;
 - Bahwa setahu saksi almh. Almarhum selama hidupnya hanya memiliki satu orang suami yaitu alm. Suami Almarhumah ;
 - Bahwa benar para Pemohon adalah para ahli waris dari almh. Almarhum dan tidak ada ahli waris lainnya;
 - Bahwa almh. Almarhum bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kemenag Langsa ;
 - Bahwa benar setahu saksi Khansa Aqila masih anak kecil dan saat ini sekolah TK (taman kanak-kanak) ;
 - Bahwa Pemohon II layak menjadi wali untuk mengurus kepentingan hukum anak tersebut Anak Kedua binti Suami Almarhumah dan Pemohon II sepengetahuan saksi berkelakuan baik di Kampung dan tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma kesusilaan maupun melanggar hukum ;
 - Bahwa setahu saksi Anak kedua dengan Pemohon II berhubungan sangat dekat sebagai bibinya ;
 - Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus tunjangan Taspen ;
2. Saksi II, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D.2, pekerjaan Jualan, jabatan sekdes, tempat tinggal di Sigli. Telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga kenal dengan Almh. Almarhum dan telah meninggal dunia pada tahun ini, meninggalnya di Banda Aceh dan dimakamkan di Sigli serta saksi hadir pada saat pemakamannya ;
- Bahwa benar Pemohon I adalah ayah kandung almh. Almarhum, sedangkan Pemohon II sampai Pemohon IV adalah saudara kandung Alm. Almarhum ;
- Bahwa semasa hidupnya almh. Almarhum pernah menikah dengan Suami Almarhumah, akan tetapi suaminya tersebut telah terlebih dahulu meninggal dunia ;
- Bahwa almh. Almarhum dan alm. Suami Almarhumah telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Noval Askia binti Suami Almarhumah dan Anak Kandung Almarhum, akan tetapi Noval Askia telah terlebih dahulu meninggal dunia daripada almh. Almarhum ;
- Bahwa saksi kenal dengan para anak almh. Almarhum ;
- Bahwa orang tua almh. Almarhum yang masih hidup hanya ayahnya (Pemohon I), sedangkan ibunya yang bernama Nursiah binti Abdurrahman telah lebih dahulu meninggal dunia ;
- Bahwa setahu saksi almh. Almarhum selama hidupnya hanya memiliki satu orang suami yaitu alm. Suami Almarhumah ;
- Bahwa benar para Pemohon adalah para ahli waris dari almh. Almarhum dan tidak ada ahli waris lainnya;
- Bahwa almh. Almarhum bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kemenag Langsa ;
- Bahwa benar setahu saksi Khansa Aqila masih anak kecil dan saat ini sekolah TK (taman kanak-kanak) ;
- Bahwa Pemohon II layak menjadi wali untuk mengurus kepentingan hukum anak tersebut Khansa Aqila binti Suami Almarhumah dan Pemohon II sepengetahuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi berkelakuan baik di Kampung dan tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma kesusilaan maupun melanggar hukum ;

- Bahwa setahu saksi Pemohon II suaminya telah meninggal dunia ;
- Bahwa setahu saksi Khansa Aqila dengan Pemohon II berhubungan sangat dekat sebagai bibinya ;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus tunjangan Taspen ;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan tidak berkeberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut, dan dalam kesimpulannya tetap pada pendirian mengajukan Penetapan wali pengampu dan penetapan Ahli Waris serta tidak lagi mengajukan tanggapan apapun serta memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bahagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan para Pemohon adalah memohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almh. Almarhum dan juga Pemohon II agar ditetapkan menjadi wali Pengampu dari Anak Kandung Almarhum yang masih kecil dan di bawah umur dikarenakan orang tua dari anak tersebut keduanya telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon juga telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1-P.3) dan ternyata alat bukti tertulis tersebut merupakan akta otentik yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingganya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*Volleding*) dan mengikat (*Binden*) yang menerangkan bahwa memang para Pemohon adalah ahli waris dari almh. Almarhum yang pernah bekerja pada Kantor Kemenag Langsa dan telah meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 2013 serta Anak Kandung Almarhum adalah anak yang masih kecil dan di bawah umur, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Sulaiman bin Daud dan Marwandi, A.Ma bin Suami Almarhumah dan telah ternyata keterangan para saksi Pemohon tersebut didasarkan atas pengetahuan para saksi sendiri dan juga telah disampaikan di bawah sumpah, keterangan para saksi tersebut justru saling bersesuaian dan pula mendukung terhadap dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka menurut Majelis Hakim dan telah memenuhi syarat materiil dan syarat formil sebagai saksi, maka sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R.bg keterangan para saksi tersebut telah bernilai kekuatan pembuktian untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan bukti tertulis dan saksi-saksi lalu dihubungkan dengan keterangan para Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada intinya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar para Pemohon adalah keluarga dari almh. Almarhum ;
- Bahwa benar almh. Almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 2013 ;
- Bahwa ibu kandung, suami dan juga salah satu anak dari almh. Almarhum telah telah lebih dahulu meninggal dunia ;
- Bahwa benar saat ini almh. Almarhum hanya meninggalkan ahli waris yaitu para Pemohon dan tidak ada ahli waris yang lainnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almh. Almarhum tidak ada memiliki suami lain selain alm. Suami Almarhumah ;
- Bahwa Anak Kandung Almarhum memang masih kecil dan di bawah umur sehingga tidak cakap berbuat untuk kepentingan dirinya sendiri ;
- Bahwa selama ini Anak Kandung Almarhum tinggal bersama dengan para Pemohon ;
- bahwa Pemohon II layak untuk menjadi wali pengampu dari Anak Kandung Almarhum karena dia sepengetahuan saksi berkelakuan baik di kampung dan tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma kesusilaan maupun melanggar hukum. Dan juga Pemohon II memiliki hubungan emosional yang sangat dekat dengan anak tersebut ;
- bahwa tujuan para Pemohon mengurus permohonan ahli waris dan perwalian ini untuk mengurus tunjangan TASPEN almh. Almarhum dan juga untuk mengurus kepentingan hukum, harta-harta anak dari almh. Almarhum yang masih kecil bernama Anak Kandung Almarhum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terbukti memang hanya para Pemohon sebagai ahli waris dari almh. Almarhum dengan kedudukan PEMOHON I sebagai ayah kandung dari almh. Almarhum dan Anak Kandung Almarhum sebagai anak kandung almh. Almarhum, sedangkan yang lainnya yaitu PEMOHON II, PEMOHON III, Yusniar, S.K.M binti Hasan hubungannya hanya sebatas saudara perempuan kandung dari almh. Almarhum, oleh karena itu berdasarkan prinsip hijab-mahjub dalam pembagian warisan maka para saudara kandung dari almh. Almarhum terhibab oleh Ayah kandung dan anak kandung almh. Almarhum yang memiliki hubungan lebih dekat dengan pewaris. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas menurut Majelis Hakim PEMOHON I dan Anak Kandung Almarhum menghibab para saudara perempuan kandung pewaris tersebut untuk menjadi ahli waris dari Almh. Almarhum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 86 K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1995 serta ketentuan pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat selama masih ada anak kandung baik laki-laki ataupun perempuan dan atau apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan dari Pewaris hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda, maka hak waris para saudara kandung yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris menjadi tertutup (terhijab) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa' ayat 176 yang berbunyi :

إِنْ أَمْرٌ فَلْيُسْرًا أَوْ لَوْالَهُ خِثٌّ فَلَهَا يَصْفُ مَا

Artinya : “ Jika seseorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu mendapat seperdua dari harta yang ditinggalkannya” ;

Menimbang, bahwa terhadap ayat tersebut, mengutip pendapat Ibnu Abbas yang selanjutnya yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri bahwa jika orang yang meninggal dunia itu tidak mempunyai anak, baik laki-laki atau perempuan, maka saudara mendapat bagian setengah. Maka Mafhum mukhallafahnya jika orang yang meninggal dunia itu mempunyai anak, baik laki-laki ataupun perempuan maka saudara perempuan itu tidak mendapat bagian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim dapat menetapkan PEMOHON I dan Anak Kandung Almarhum sebagai ahli waris dari Almh. Almarhum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti yang diajukan oleh para pemohon dan bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dari para pemohon tersebut saling mendukung dan menguatkan dalil permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam bahwa orang yang masih hidup dan tidak cakap melakukan perbuatan hukum dapat ditetapkan wali atas dirinya dan terungkap fakta bahwa Anak Kandung Almarhum masih kecil dan dibawah umur dan ia juga sudah tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II adalah bibi kandung dari Anak Kandung Almarhum, Pemohon II juga mempunyai kelakuan yang baik dan tidak pernah melanggar norma-norma kesusilaan dan hukum dan selama ini Pemohon II juga yang merawat Anak Kandung Almarhum, jadi Majelis Hakim menilai Pemohon II mampu dan layak menjadi wali dari Anak Kandung Almarhum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Permohonan para Pemohon agar Pemohon II ditetapkan menjadi wali pengampu dari Anak Kandung Almarhum telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena dapat diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara permohonan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan telah meninggal dunia Almarhum pada hari Sabtu, tanggal 12 Januari 2013;
3. Menetapkan ahli waris dari almh. Almarhum adalah sebagai berikut :
 1. PEMOHON I (Pemohon I/ Ayah Kandung) ;
 2. Anak Kandung Almarhum (Anak Perempuan Kandung) ;
 4. Menetapkan Pemohon II (PEMOHON II) sebagai wali pengampu dari anak yang bernama Anak Kandung Almarhum, 3 tahun 7 bulan ;
5. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1434 Hijriyah, oleh kami **Arif Irhami, S.H.I., M. Sy** yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli sebagai Ketua Majelis, **Zulkifli Firdaus, S.H.I** dan **Achmad**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fikri Oslami, S.H.I., M.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana Penetapan tersebut oleh Majelis Hakim diucapkan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1434 Hijriyah dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Kamariah, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ZULKIFLI FIRDAUS, S.H.I

ARIF IRHAMI, S.H.I., M.Sy

ACHMAD FIKRI OSLAMI, S.H.I., M.H.I

PANITERA PENGGANTI,

KAMARIAH, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	= Rp. 50.000,-
2. Panggilan Pemohon dan Termohon	= Rp. 150.000,-
3. Redaksi	= Rp. 5.000,-
4. Meterai	= Rp. 6.000,- +
J u m l a h	= Rp. 241.00,-

----- (Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) -----



Untuk Salinan yang sama bunyinya

Sigli, 28 Mei 2013

Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli,

Drs. Masykur



P E N E T A P A N

Nomor 90/Pdt.P/2017/PA.Bjb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

NOER AINIYAH Binti H. ZAINAL HAKIM, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat tinggal di Jalan Permata Jamrud, No. 150 A RT.16 RW.04, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, sebagai Pemohon I sebagai **Pemohon I**. Bertindak untuk diri sendiri dan sebagai wali dari anak yang bernama:

1. **SHOFIA QALBY Binti Drs. FAKHRANI**, lahir tanggal 15 Februari 1999 (umur 18 tahun 2 bulan), agama Islam, tempat tinggal di Jalan Permata Jamrud, No. 150 A RT.16 RW.04, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
2. **SYIFA SHUDURINA Binti Drs. FAKHRANI**, lahir tanggal 23 Agustus 2004, (umur 12 tahun 9 bulan), agama Islam, tempat tinggal di Jalan Permata Jamrud, No. 150 A RT.16 RW.04, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;

YASFI SHADRIYAH, S.Pd. Binti Drs. FAKHRANI, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati Honorer, pendidikan Strata I, bertempat tinggal di Jalan Permata Jamrud, No. 150 A RT.16 RW.04, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon II**;

Halaman 1 dari 32 halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. JAYADI Bin ABDURRAHMAN, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, bertempat tinggal di Jalan Menteri 4 Gang Al-Hikmah, RT.24 RW.08, Kelurahan Keraton, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar sebagai **Pemohon III**;

MUHAMMAD NUR Bin ABDURRAHMAN, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petugas Kebersihan, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, bertempat tinggal di Jalan P.Abdurrahman, RT.24 RW.08, Kelurahan Keraton, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, sebagai **Pemohon IV**.

Selanjutnya, Pemohon I – IV disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas-berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor Register 90/Pdt.P/2017/PA.Bjb tanggal 23 Mei 2017 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon adalah isteri, anak-anak dan saudara laki-laki kandung dari almarhum Drs. Fakhrani bin Abdurrahman;
2. Bahwa, Pemohon I menikah dengan Drs. Fakhrani bin Abdurrahman pada tanggal 17 Mei 1992 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: B184/29/V/1992, tertanggal 23 Mei 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Drs. Fakhrani bin Abdurrahman telah dikaruniai 3 orang anak yaitu:
 - a. Yasfi Shadriyah, S.Pd binti Drs. Fakhrani, lahir tanggal 11 April 1993;
 - b. Shofia Qalby binti Drs. Fakhrani, lahir tanggal 15 Februari 1999;

Halaman 2 dari 32 halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Syifa Shudurina binti Drs. Fakhriani, lahir tanggal 23 Agustus 2004;
4. Bahwa, ayah kandung dari Drs. Fakhriani bin Abdurrahman yang bernama Abdurrahman menikah dengan ibu kandung dari Drs. Fakhriani bin Abdurrahman yang bernama Atikah dan telah dikaruniai 3 orang anak yaitu:
 - a. Drs. Fakhriani bin Abdurrahman, lahir tanggal 19 Desember 1959;
 - b. M. Jayadi bin Abdurrahman, lahir tanggal 10 Oktober 1966;
 - c. Muhammad Nur bin Abdurrahman, lahir tanggal 10 Oktober 1969.
5. Bahwa selain memiliki saudara kandung, almarhum Drs. Fakhriani bin Abdurrahman juga memiliki 1 orang saudara seibu yang bernama Siti Maimanah binti Jamparing berumur 59 tahun;
6. Bahwa almarhum Drs. Fakhriani bin Abdurrahman telah meninggal dunia pada 14 April 2017 karena Sakit sesuai dengan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, No: 6372-KM-19042017-0008 tertanggal 20 April 2017;
7. Bahwa, Ayah Kandung dari almarhum Drs. Fakhriani bin Abdurrahman yang bernama Abdurrahman telah meninggal dunia pada tahun 2007, kemudian ibu kandung dari almarhum Drs. Fakhriani bin Abdurrahman yang bernama Atikah juga telah meninggal dunia pada tahun 2000;
8. Bahwa ketika almarhum Drs. Fakhriani bin Abdurrahman meninggal dunia meninggalkan ahli waris yaitu:
 - a. Noer Ainiyah binti H. Zainal Hakim (isteri);
 - b. Yasfi Shadriyah, S.Pd binti Drs. Fakhriani (anak perempuan kandung)
 - c. Shofia Qalby binti Drs. Fakhriani, (anak perempuan kandung)
 - d. Syifa Shudurina binti Drs. Fakhriani, (anak perempuan kandung);
 - e. M. Jayadi bin Abdurrahman, (saudara laki-laki kandung);
 - f. Muhammad Nur bin Abdurrahman, (saudara laki-laki kandung);dan tidak ada ahli waris lainnya selain nama-nama yang tersebut diatas;
9. Bahwa semasa hidupnya almarhum Drs. Fakhriani bin Abdurrahman tidak meninggalkan hutang yang masih belum diselesaikan dan tidak ada wasiat ataupun hibah;
10. Bahwa Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan

Halaman 3 dari 32 halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan ahli waris dari almarhum Drs. Fakhri bin Abdurrahman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan nama-nama ahli waris dari almarhum Drs.Fakhri bin Abdurrahman tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Subsidiar:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pembacaan permohonan. Bahwa setelah pembacaan permohonan, Para Pemohon mengajukan perubahan permohonan berupa penambahan petitum mengenai penentuan bagian masing-masing para ahli waris;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan kepada Para Pemohon perihal adanya perbedaan pendapat di antara para Ulama maupun dalam Putusan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya terkait kedudukan dan kapabilitas anak perempuan menghijab atau menghalangi saudara kandung pewaris memperoleh bagian harta waris. Terhadap pertanyaan tersebut, Para Pemohon menyatakan bahwa mereka meyakini anak perempuan tidak menghalangi para saudara kandung untuk mewarisi harta pewaris;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Noer Ainiyah Nomor 6372055505700002 tanggal 09 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nasegelen)

Halaman 4 dari 32 halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yasfi Shadriyah, Nomor 6372055104930001 tanggal 19 September 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian
 3. (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;
 4. Fotokopi Surat Izin Mengemudi atas nama Muhammad Nur, Nomor 6303051010690030 tanggal 20 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3;
 5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Jayadi, Nomor 66 10 18 16 1088 tanggal 25 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kapolres Kabupaten Banjar, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.4;
 6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor B184/29/V/1992 tanggal 23 Mei 1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.5;
 7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yasfi Shadriyah Nomor. 8380/1993 tanggal 07 Juni 1993, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Surabaya, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.6;
 8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Shofia Qalby Nomor. 477/1239/CS-HST/U/1999 tanggal 15 Maret 1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Tengah, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai

Halaman 5 dari 32 halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.7;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Syifa Shudurina Nomor. 1280/Eksam/X/2004 tanggal 29 Oktober 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.8;
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372053011070018 tanggal 26 April 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.9;
11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Fakhriani, Nomor: AM.768.0001949 tanggal 20 April 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.10.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti lain berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi Pertama, bernama **MASTIAH binti AHMAD RHODI**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Menteri 4, No. 96 RT. 24 RW. 08, Kelurahan Keraton, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar. Saksi mengaku sebagai tetangga orang tua Pewaris, selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon I bernama Fakhriani bin Abdurrahman. Fakhriani dengan Pemohon I telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak bernama Yasfi Shadriyah, Shofia Qalby dan Syifa Shudurina;

Halaman 6 dari 32 halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama hidupnya Fakhrani tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain Pemohon I dan tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai isteri atau anak-anak dari Fakhrani;
 - Bahwa selama perkawinan Fakhrani dengan Pemohon I tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Fakhrani telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2017. Fakhrani meninggal dunia karena sakit gula darah dan dirawat dengan baik oleh Pemohon I;
 - Bahwa Fakhrani tidak ada meninggalkan hutang atau wasiat yang belum diselesaikan;
 - Bahwa Ayah Fakhrani bernama Abdurrahman sudah meninggal dunia pada tahun 2007, kemudian ibu kandung dari Fakhrani bernama Atikah juga telah meninggal dunia pada tahun 2000;
 - Bahwa Fakhrani mempunyai saudara kandung 2 (dua) orang, bernama M.Jayadi dan Muhammad Nur;
 - Bahwa Fakhrani mempunyai saudara seibu 1 (satu) orang perempuan bernama Siti Maimanah binti Jamparing;
 - Bahwa Anak Fakhrani dengan Pemohon I sampai saat ini masih tetap beragama Islam;
 - Bahwa Fakhrani meninggal dunia dalam keadaan Islam dan para Pemohon sekarang ini dalam keadaan Islam;
 - Bahwa Para Pemohon tidak pernah diputuskan oleh Pengadilan melakukan percobaan pembunuhan terhadap Fakhrani;
2. Saksi Kedua, bernama **NURIAH bin AHMAD**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Menteri 4, No. 2 RT. 24 RW. 08, Kelurahan Keraton, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar. Saksi mengaku sebagai Ipar Pemohon I (Isteri Pemohon III), selanjutnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan suami Pemohon I yang bernama Fakhrani bin Abdurrahman;

Halaman 7 dari 32 halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Fakhrani dengan Pemohon I telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak bernama Yasfi Shadriyah, Shofia Qalby dan Syifa Shudurina;
 - Bahwa selama hidupnya Fakhrani tidak pernah menikah dengan perempuan selain Pemohon I dan tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai isteri atau anak-anak dari Fakhrani;
 - Bahwa selama perkawinan Fakhrani dengan Pemohon I tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Fakhrani telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2017. Fakhrani meninggal dunia karena sakit gula darah dan dirawat dengan baik oleh Pemohon I;
 - Bahwa Fakhrani tidak ada meninggalkan hutang atau wasiat yang belum diselesaikan;
 - Bahwa Ayah Fakhrani bernama Abdurrahman sudah meninggal dunia pada tahun 2007, kemudian ibu kandung dari Fakhrani bernama Atikah juga telah meninggal dunia pada tahun 2000;
 - Bahwa Fakhrani mempunyai saudara kandung 2 (dua) orang, bernama M.Jayadi dan Muhammad Nur;
 - Bahwa Fakhrani mempunyai saudara seibu 1 (satu) orang perempuan bernama Siti Maimanah binti Jamparing;
 - Bahwa Anak Fakhrani dengan Pemohon I sampai saat ini masih tetap beragama Islam;
 - Bahwa Fakhrani meninggal dunia dalam keadaan Islam dan para Pemohon sekarang ini dalam keadaan Islam;
 - Bahwa Para Pemohon tidak pernah diputuskan oleh Pengadilan melakukan percobaan pembunuhan terhadap Fakhrani.
3. Saksi Kedua, bernama **NASRI bin H. NASAR**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl.A.Yani, Belakang BPD Golkar Gang kayu Tangi, No. 22 RT. 03 RW. 04, Kelurahan Jawa, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar. Saksi mengaku sebagai murid almarhum Fakhrani, selanjutnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 8 dari 32 halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi hanya kenal dengan Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa Saksi kenal dengan almarhum Fakhrani bin Abdurrahman, beliau adalah guru Saksi sewaktu sekolah di Madrasah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Fakhrani dikaruniai tiga orang anak namun Saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa Fakhrani telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2017;
- Bahwa Saksi kenal dengan ayah kandung Fakhrani bernama Abdurrahman dan ibu kandung bernama Atikah;
- Bahwa Fakhrani mempunyai saudara kandung 2 (dua) orang, bernama M.Jayadi dan Muhammad Nur. Saksi tidak mengetahui saudara lain dari Fakhrani;
- Bahwa Saksi bertemu Fakhrani terakhir tahun 1995.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan memohon penetapan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti dikemukakan di atas;

Kewenangan mengadili

Menimbang, bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris *a quo* diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam (personalitas keislaman), karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 *jo*. Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (b) angka Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo*. Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Halaman 9 dari 32 halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Para Pemohon

Menimbang, bahwa terkait dengan *legal standing* Para Pemohon, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa permohonan penetapan ahli waris diajukan oleh isteri, anak kandung, dan saudara kandung Drs. Fakhrani;
- Bahwa permohonan penetapan ahli waris harus diajukan oleh kerabat terdekat yang termasuk dalam ahli waris dari pewaris, *in casu* Para Pemohon adalah isteri, anak kandung, dan saudara kandung dari pewaris Drs. Fakhrani;
- Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dimaksud (*legitima persona standi in judicio*);
- Bahwa selanjutnya, terkait dengan kedudukan Pemohon I yang bertindak untuk diri sendiri dan sebagai wali dari dua orang anak yang bernama **Shofia Qalby binti Drs.Fakhrani**, lahir tanggal 15 Februari 1999 (umur 18 tahun 2 bulan) dan **Syifa Shudurina binti Drs.Fakhrani**, lahir tanggal 23 Agustus 2004, (umur 12 tahun 9 bulan), Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut;
- Bahwa dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa:
"(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya; (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan"
- Bahwa yang dimaksud dengan anak menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Halaman 10 dari 32 halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah seorang anak yang diwakili oleh Pemohon I telah ternyata berusia 18 tahun 2 bulan, hal mana jika dilihat dari ketentuan dalam UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak tersebut di atas, umur anak dimaksud telah melebihi umur anak maksimal dalam kedua peraturan tersebut. Artinya, bahwa secara harfiah, dia bukan lagi seorang anak, melainkan telah dewasa dan dapat dianggap cakap melakukan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa namun demikian, kelebihan dua bulan umur anak dari batas maksimal seseorang dikategorikan sebagai anak tidak serta merta menyebabkan dia tidak dapat lagi diwakili oleh ibu kandungnya. Selain karena umur si anak baru lebih dari dua bulan dari batas maksimal umur anak, kemungkinan ada pertimbangan psikologis Pemohon I agar si anak tidak perlu berhadapan dengan persidangan Pengadilan yang cenderung melahirkan ketegangan psikis pada diri si anak. Dalam usia tersebut, kemungkinan si anak belum dapat menemukan permasalahan dan mengatasi ketegangan psikis yang sangat mungkin dihadapi selama mengikuti persidangan;
- Bahwa dengan mempertimbangkan aspek psikologis tersebut, Pengadilan berpendapat, kedudukan Pemohon I untuk bertindak atas nama dirinya sendiri dan sekaligus sebagai wali dari kedua anaknya adalah sah menurut hukum.

Pokok permohonan Para Pemohon

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon *a quo* adalah permintaan kepada Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menetapkan ahli waris dari almarhum Drs. Fakhrani. yang telah meninggal dunia berdasarkan ketentuan hukum kewarisan Islam (*waris mal waris*);

Menimbang, bahwa setelah pembacaan permohonan, Para Pemohon mengajukan perubahan berupa penambahan petitum agar Pengadilan menetapkan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa terhadap penambahan petitum tersebut, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 32 halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada prinsipnya, perubahan terhadap gugatan/permohonan tidak boleh menambah petitum yang merubah keadaan materil (*vide* Pasal 127 Rv.);
- Bahwa namun demikian, dalam keadaan tertentu, perubahan diperkenankan sekalipun ada penambahan petitum jika hal dimaksud tidak mengubah kejadian atau fakta materil sebelumnya;
- Bahwa selain itu, perubahan tidak boleh menimbulkan atau melahirkan suatu keadaan hukum atau hubungan hukum yang sama sekali baru dan berbeda dengan keadaan dan/atau hubungan hukum sebelumnya;
- Bahwa permohonan penambahan petitum penetapan bagian waris dari masing-masing ahli waris sebagaimana tersebut di atas masih dalam kerangka atau rangkaian fakta kejadian yang sama, yaitu adanya pewaris yang meninggal dunia dan meninggalkan beberapa ahli waris. Lagi pula, dalam Al Qur'an, dalil-dalil perihal ahli waris sebagaimana dalam QS Al Nisa ayat 11 – 12 senantiasa diikuti dengan bagian waris ;
- Bahwa dari hal tersebut, dapat dipahami penentuan siapa ahli waris dan penentuan bagian masing-masing ahli waris merupakan sebuah sekuel (rangkaiian kejadian dan ketetapan) yang saling bertalian satu dengan lainnya. Penambahan satu petitum berupa permohonan ditetapkan bagian waris sama sekali tidak merubah kejadian atau fakta materil perkara, sebaliknya ia semakin melengkapi simpulan atau akhir dari penentuan siapa ahli waris dari pewaris;
- Bahwa, lagi pula perkara ini merupakan perkara Permohonan yang berarti bahwa permohonan penambahan petitum merupakan kehendak atau inisiatif dari seluruh Pemohon yang memiliki kepentingan hukum sama. Dengan lain perkataan, penambahan petitum dalam permohonan secara objektif tidak merugikan atau menyerang kepentingan atau hak dari pihak lain oleh karena pihak-pihak dalam permohonan memiliki kepentingan hukum yang sama (*mutual interest of the parties*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat permohonan penambahan petitum yang diajukan Para Pemohon dapat diterima dan dibenarkan menurut hukum. Bahwa oleh

Halaman 12 dari 32 halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karenanya, pokok permohonan dalam perkara *a quo* adalah dua, yaitu penentuan siapa ahli waris yang sah dan bagian masing-masing ahli waris.

Pertimbangan alat-alat bukti Para Pemohon (*bewijs middel*)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 – P.10 yang diajukan oleh Para Pemohon telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;
- Bahwa oleh karenanya Bukti P.1 – P.10 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai);
- Bahwa alat bukti P.1 - P.3 yang diajukan Para Pemohon merupakan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) dan Surat Keterangan sebagai bukti identitas diri bagi Pemohon I – Pemohon III. Bahwa dengan bukti tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa Para Pemohon adalah pihak *principal* atau materil (*natuurlijke person*) yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung (*rechtsbevoegheid*) dengan pokok perkara;
- Bahwa bukti P.4 merupakan fotokopi SIM Pemohon IV. Bahwa sekalipun SIM pada prinsipnya bukan bukti primer identitas diri seseorang, namun dalam praktik, SIM sering diberlakukan sebagai pengganti identitas diri seseorang ketika bukti primer belum atau tidak ada. Bahwa berdasarkan hal tersebut, bukti P.4, menurut Pengadilan dapat menjadi bukti identitas diri Pemohon IV dan setelah memperhatikan isi dari bukti P.4, terbukti Pemohon IV adalah pihak materil (*principal*) dalam perkara ini;
- Bahwa bukti P.5 merupakan fotokopi kutipan akta nikah Pemohon I dengan Drs. Fakhrani. Bukti P.5 merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan

Halaman 13 dari 32 halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian sempurna dan mengikat. Bahwa berdasarkan bukti P.5 tersebut, maka telah terbukti Pemohon I dan Drs. Fakhrani adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 17 Mei 1992, selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

- Bahwa bukti P.6 – P.8 merupakan fotokopi kutipan akta kelahiran ketiga anak Pemohon I dan Drs. Fakhrani yaitu 1) YASFI SHADRIYAH lahir tanggal 11 April 1993; 2) SHOFIA QALBY lahir tanggal 15 Pebruari 1999; dan 3) SYIFA SHUDURINA lahir tanggal 23 Agustus 2004. Bukti P.6 – P.8 tersebut merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Bahwa berdasarkan bukti tersebut, maka telah terbukti Pemohon I dan Drs. Fakhrani telah dikaruniai tiga orang anak sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;
- Bahwa bukti P.9 merupakan fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dengan Dr.s Fakhrani yang masing-masing menerangkan adanya hubungan kekerabatan di antara Pemohon I – Pemohon II dengan Drs. Fakhrani;
- Bahwa bukti P.10 merupakan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil yang pada pokoknya menerangkan bahwa Drs. Fakhrani telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2017. Bahwa bukti P.10 merupakan akta autentik, karenanya memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Dengan demikian, berdasarkan bukti dimaksud maka telah ternyata Drs. Fakhrani meninggal dunia pada tanggal 14 April 2017, selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang keabsahan formilnya akan dipertimbangkan oleh Majelis sebagai berikut:

- Bahwa Saksi I Para Pemohon merupakan tetangga dari orang tua kandung Drs. Fakhrani, sementara Saksi II yang dihadirkan oleh Para Pemohon merupakan kerabat dekat Para Pemohon. Adapun Saksi III merupakan murid dari Drs. Fakhrani;

Halaman 14 dari 32 halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk terangnya pokok masalah, maka pemeriksaan dalam perkara *a quo* memerlukan penelusuran dan identifikasi yang jelas tentang silsilah keluarga dari almarhum Drs. Fakhrani dan kerabat dekat, tetangga, atau mantan murid merupakan pihak-pihak yang dipandang mengetahui dengan rinci silsilah keluarga almarhum;
- Bahwa dalam hukum Islam, syarat untuk memberikan kesaksian perihal nasab adalah dapat dipercaya dan mengetahui persis urutan nasab tersebut. Hal ini ditegaskan dalam kitab Bughayatul Murtasyidin halaman 155, yang diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan sebagai berikut:

إن كان المقر كالشاهد والحاكم ثقة أمينا عارفاً بلحوق النسب صح

Artinya:

“Jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi-saksi dan hakim itu percaya, jujur dan tahu silsilah nasab tersebut, maka hal itu sah”

- Bahwa perlu dipertimbangkan apakah status Para Saksi tersebut dapat didengar keterangannya dan dipertimbangkan materi keterangannya tersebut sebagai berikut;
- Bahwa dalam Pasal 172 R.Bg dikemukakan ketentuan mengenai siapa yang tidak boleh didengar kesaksiannya:
 1. Yang tidak boleh didengar sebagai saksi adalah:
 1. Keluarga sedarah dan keluarga karena perkawinan dari salah satu pihak menurut keturunan lurus;
 2. Saudara laki-laki dan saudara perempuan dari ibu dan keponakan di dalam daerah (karesidenan) Bengkulu, Sumatera Barat, dan Tapanuli, kalau hak mewaris di situ diatur menurut adat setempat;
 3. Istri atau suami dari salah satu pihak meskipun sudah bercerai;
 4. Anak-anak yang tidak diketahui pasti bahwa mereka sudah berumur lima belas tahun;
 5. Orang gila meskipun kadang-kadang ingatannya terang;

Halaman 15 dari 32 halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Akan tetapi keluarga sedarah atau keluarga karena perkawinan tidak dapat menolak sebagai saksi dalam perkara perselisihan kedua belah pihak tentang keadaan menurut hukum perdata atau tentang suatu perjanjian pekerjaan;
 3. Hak mengundurkan diri daripada memberi kesaksian dalam perkara yang disebut dalam ayat di atas ini tidak berlaku buat orang-orang yang disebut pada pasal 174 ayat (1) dan (2).
- Bahwa yang perlu dimaknai lebih lanjut mengenai makna dari Pasal 172 tersebut adalah redaksi "*dalam perkara perselisihan kedua belah pihak tentang keadaan menurut hukum perdata atau tentang suatu perjanjian pekerjaan*". Keadaan menurut hukum perdata adalah keadaan-keadaan yang lahir dari adanya suatu perbuatan perdata dan/atau peristiwa keperdataan. Perbuatan perdata yang dimaksudkan antara lain terjadinya perkawinan, pembuatan perjanjian, penjaminan, dan sebagainya. Sementara peristiwa perdata adalah kejadian-kejadian yang menimbulkan akibat hukum keperdataan seperti kelahiran dan kematian. Dalam konteks perkara *a quo*, Pengadilan perlu menemukan fakta mengenai kematian Drs. Fakhrani serta silsilah keluarganya, fakta mana termasuk dalam katagori keadaan menurut hukum perdata yang menimbulkan akibat hukum keperdataan tertentu, yaitu pewarisan dari pewaris kepada para ahli waris;
 - Bahwa dengan demikian, sekalipun salah seorang Saksi (Saksi II) yang dihadirkan Para Pemohon adalah isteri dari Pemohon III, Para Saksi tetap dapat memberikan keterangan mengenai kematian Drs. Fakhrani dan silsilah keluarganya. Bahwa dengan demikian, maka kesaksian Para Saksi secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;
 - Bahwa para Saksi di persidangan secara terpisah mengemukakan hal-hal sebagaimana dalam duduk perkara;
 - Bahwa keterangan Para Saksi lain saling bersesuaian dan didasarkan pada pengetahuannya sendiri. Bahwa setelah memperhatikan materi kesaksian Para Saksi sebagaimana yang tersebut secara lengkap dalam duduk perkara, keterangan Para Saksi saling bersesuaian satu sama lain dan

Halaman 16 dari 32 halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berkaitan dengan pokok perkara, keterangan-keterangan tersebut dikonstatasi sebagai fakta hukum tetap sebagaimana berikut ini;

Konstatasi fakta-fakta hukum

Menimbang, bahwa dari proses pembuktian yang telah dilakukan dalam persidangan dengan mengaitkan alat-alat bukti tertulis dan keterangan para Saksi di persidangan serta mempertimbangkan substansi dan relevansinya dengan pokok permohonan Para Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta yang selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Drs. Fakhrani dan Pemohon I adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 17 Mei 1992;
- Bahwa dari perkawinan Drs. Fakhrani dan Pemohon I telah dikaruniai tiga orang anak, yaitu 1) YASFI SHADRIYAH lahir tanggal 11 April 1993; 2) SHOFIA QALBY lahir tanggal 15 Pebruari 1999; dan 3) SYIFA SHUDURINA lahir tanggal 23 Agustus 2004;
- Bahwa Drs. Fakhrani telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2017;
- Bahwa ketika Drs. Fakhrani meninggal dunia, kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa semasa hidupnya, Drs. Fakhrani hanya menikah satu kali dengan Pemohon I dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Drs. Fakhrani meninggal dunia dalam keadaan Islam dan Para Pemohon sampai saat ini juga masih beragama Islam;
- Bahwa tidak ada perselisihan di antara Para Pemohon mengenai harta warisan dari Drs. Fakhrani.

Pertimbangan hukum mengenai pokok perkara

Petitum: Menetapkan Ahli Waris dari Drs. Fakhrani

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan petitum tersebut sebagai berikut:

- Bahwa prinsip atau asas yang mendasari kewarisan dalam Islam adalah asas *ijbari*, yaitu asas yang menetapkan bahwa setiap orang tidak dapat sekehendaknya menetapkan ahli waris dan bagiannya masing-masing karena dalil-dalil tentang kewarisan bersifat *qath'i* (pasti dan terperinci), karena itu Pengadilan Agama akan menetapkan ahli waris dari almarhum

Halaman 17 dari 32 halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Fakhrani berdasarkan ketentuan-ketentuan dan dalil-dalil kewarisan dalam hukum Islam;

- Bahwa syarat pertama dan utama perihal waris mewarisi dalam hukum Islam adalah kesamaan *aqidah*. Seorang muslim hanya boleh mewarisi dan diwarisi oleh muslim yang lainnya. Hal ini ditegaskan dalam hadits nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari:

عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم (رواه البخاري)

Artinya:

“Dari Usamah bin Zaid ra Rasulullah SAW bersabda: orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim”

- Bahwa ketentuan dasar dalam penetapan ahli waris mengacu pada al Qur'an surat Al Nisa ayat 11 dan 12 yang pada pokoknya menetapkan ahli waris yang sah dan bagiannya masing-masing sebagaimana berikut ini:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ

أُثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ

مِنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ

فَلِلَّامَةِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلَّامَةِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ

دَيْنٍ عَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ

إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Halaman 18 dari 32 halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ

فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا

تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ

بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ

أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي

الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

حَلِيمٌ

Artinya:

(11) Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Halaman 19 dari 32 halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(12) dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.

- Bahwa dalam hukum waris Islam, bila mayit meninggal dunia, maka yang dapat menjadi ahli waris adalah kerabat terdekat, baik ahli waris *sababiyah* (hubungan perkawinan) maupun ahli waris *nasabiyah* (hubungan darah);
- Bahwa ketentuan mengenai syarat-syarat menjadi ahli waris diatur dalam Pasal 171 huruf (c), 172 dan 190 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: Pasal 171 huruf (c):

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Pasal 172:

Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang

Halaman 20 dari 32 halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya;

Pasal 190:

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris; b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat"

- Bahwa dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam ditetapkan:

Ayat (1):

Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

Menurut hubungan darah:

a. Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;

b. Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda

Ayat (2):

Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

- Bahwa dalam permohonan *a quo*, yang perlu dipertimbangkan adalah apakah kedudukan ketiga anak Drs. Fakhriani (Pewaris) yang merupakan anak perempuan memiliki kemampuan menghijab (menghalangi) saudara kandung pewaris untuk menjadi ahli waris?. Terkait dengan hal ini, terdapat perbedaan pendapat para ulama (dan juga dalam praktik Peradilan/Putusan Hakim). Pendapat **pertama**, anak perempuan tidak memiliki kemampuan untuk menghijab atau menghalangi saudara kandung. Hal ini didasarkan

Halaman 21 dari 32 halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada pemaknaan kata *walad* yang secara harfiah oleh *jumhur ulama'* diartikan sebagai anak laki-laki, bukan anak perempuan. Dalam konteks ini, ada salah satu riwayat dalam hadits Nabi Muhammad SAW yang mengisahkan bagaimana Nabi menetapkan bagian waris 2/3 kepada dua orang anak perempuan dan sisanya untuk saudara kandung dari Pewaris. Ibn Katsir al-Dimasyqi dalam tafsirnya, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Hlm. 197, Jilid 2, menyebutkan satu hadits perihal kisah tersebut:

روى أصحاب السنن إلا النسائي عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع - رضي الله عنه - بابنتيها من سعد إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع، قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ جميع ما ترك أبوهما، فلم يدع لهما مالا، ولا تنكحان إلا ولهما مال، وفي رواية: وإن المرأة لا تنكح إلا على مالها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يقضي الله في ذلك، قال: ونزلت سورة النساء: "يوصيكم الله في أولادكم"، وفي رواية: فنزلت آية الميراث، فبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى عمهما فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين، وأعط أمهما الثمن، وما بقي فهو لك. قال الترمذي: هذا حديث صحيح، وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي وسكت عنه الحافظ في الفتح وحسنه الألباني.

Artinya:

"*Ashab al-Sunan selain al-Nasa'i meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah (r.a), beliau berkata, 'Istri Sa'ad bin al-Rabi' datang membawa kedua anak perempuannya hasil perkawinannya dengan Sa'ad bin al-Rabi'i, menghadap Rasulullah (s.a.w) berkata, 'Wahai Rasulullah, 'Dua gadis ini merupakan anak perempuan Sa'ad bin al-Rabi'. Ayah mereka berdua mati syahid ketika berperang bersamamu di Uhud. Sekarang paman kedua anak perempuan ini datang mengambil seluruh harta peninggalan ayah mereka. Tidak ada sedikit pun harta peninggalan yang diserahkan kepada kedua keponakannya ini padahal keduanya tidak bisa menikah melainkan*



ada hartanya'. Dalam satu riwayat, 'padahal wanita itu tidak dinikahi melainkan karena hartanya'. Mendengar itu, Rauslullah (s.a.w) bersabda, 'Allah akan memberi keputusan dalam masalah ini. Lalu turunlah Surah al-Nisa' ayat 11 yang menyebutkan ketentuan waris. Berdasarkan ayat itu, baginda mengirimkan utusan untuk menghadap paman kepada kedua anak perempuan tersebut yang isi pesannya adalah: 'Berilah 2/3 (dua pertiga) bagian untuk dua anak perempuan Sa'ad bin al-Rabi' itu, 1/3 (sepertiga) bagian untuk ibu mereka berdua sedangkan sisanya adalah milikmu (saudara Sa'ad bin al-Rabi')'."

Peristiwa dalam hadits tersebut di atas merupakan salah satu dari sekian peristiwa pada zaman Rasulullah SAW dimana masyarakat Arab saat itu menganut suatu pemahaman bahwa mereka yang tidak terlibat atau memiliki andil dalam peperangan tidak berhak atas harta waris dari pewaris. Turunnya Surat Al Nisa ayat 11 merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kepada Nabi Muhammad SAW perihal hak mewarisi bagi anak perempuan (*asbab al nuzul*). Makna harfiah dari peristiwa dalam hadits tersebut oleh para Ulama (*jumhur ulama*) adalah anak perempuan merupakan ahli waris *ashabul furud* (telah ditentukan bagiannya) dan tidak menghalangi hak mewarisi dari saudara-saudara kandung pewaris;

- Bahwa berbeda dengan pendapat pertama tersebut di atas, pendapat **kedua** yang juga kemudian diikuti Mahkamah Agung saat ini, makna kata *walad* menurut pakar tafsir Ibnu Abbas mencakup anak laki-laki dan anak perempuan. Hal ini didasarkan pada maksud dari firman Allah SWT dalam QS Al Nisa ayat 11 dan secara khusus dalam ayat 176 yang mengatur kewarisan dalam keadaan *kalalah* (tidak memiliki ayah dan anak). Dalam ayat 176, Allah SWT berfirman:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ أَمْْرُؤَ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ

أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا أُخْتَيْنِ

Halaman 23 dari 32 halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2017/PA.Bjb



فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ

الْأُنثَيَيْنِ ^{قُل} يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

Artinya:

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah:

"Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Kata *awlad* yang merupakan bentuk jamak dari *walad* sebagaimana tergambar dalam 11 dan 176 tersebut di atas, oleh Ibnu Abbas bermakna anak laki-laki dan anak perempuan. Kedua kata tersebut dipakai untuk menunjuk pada pemakanaan anak laki-laki dan perempuan. Sebagaimana dikemukakan oleh Al-Qurthubi dalam tafsirnya *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an wa al-Mubayyin li ma Tadhmanahu min al-Sunnah wa Ayi al-Furqan*, juz 7, hal. 240-241 dan Al-Fairuzzabadi dalam tafsirnya, *Tanwir al-Miqbas min Tafsir Ibn 'Abbas*, hlm. 114, Anak dapat meng-*hijab* (menghalangi) saudara-saudara pewaris untuk mendapat hak waris karena perkataan "ولد" dalam al-Qur'an Surah al-Nisa' [4]: 176 yang bermaksud "anak" meliputi anak laki-laki dan anak perempuan sehingga keberadaan anak tanpa mempedulikan

Halaman 24 dari 32 halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2017/PA.Bjb



apakah itu anak perempuan ataupun anak laki-laki haruslah meng-*hijab* (menghalangi) hak waris saudara pewaris dalam segala jenisnya, baik itu saudara kandung, saudara seayah maupun saudara seibu.

Ibn Qudamah al-Miqdasi dalam kitabnya, *al-Mughni*, hlm. 1462 juga menegaskan perihal makna kata *walad* mencakup anak laki-laki dan perempuan:

فإنه يروى عن ابن عباس ومن تابعه أنه كان لا يجعل الأخوات مع البنات عصبية، فقال في بنت وأخت: للبنت النصف، ولا شيء للأخت. فقيل له: إن عمر قضى أنتم أعلم أم الله؟ يريد قول: بخلاف ذلك، جعل للأخت النصف. فقال ابن عباس: الله سبحانه: "إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك" (سورة النساء: 176)، فإنما جعل لها الميراث بشرط عدم الولد

Artinya:

"Diriwayatkan dari Ibn 'Abbas dan orang-orang yang sependapat dengannya bahwa beliau tidak menjadikan anak perempuan menjadi 'asabah ketika bersama saudara perempuan. Menurutnya, jika pewaris meninggalkan satu anak perempuan dan satu orang saudara perempuan, maka harta seluruhnya menjadi milik anak perempuan sedangkan saudara perempuan mahjub (tidak memperoleh bagian). Ada seseorang yang memprotes ketentuan Ibn 'Abbas tersebut dengan berkata, "Umar bin al-Khattab pernah memutus perkara seumpama itu namun berbeda dengan apa Tuan putuskan itu, karena saudara perempuan tetap memperoleh bagian separuh harta peninggalan." Ibn 'Abbas menjawab, 'Apakah Anda lebih mengetahui ataukah Allah yang lebih mengetahui hukum masalah ini?' Dalam perkataannya ini, Ibn 'Abbas mengisyaratkan firman Allah, '...jika seseorang meninggal dunia dan dia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya...' (QS. al-Nisa' [4]: 176). Syarat saudara perempuan memperoleh bagian waris adalah ketika tidak ada anak (baik laki-laki maupun perempuan)"

Halaman 25 dari 32 halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2017/PA.Bjb



Pandangan para ulama tersebut di atas menunjukkan adanya pergeseran pemahaman kata *walad* yang semula ditafsirkan hanya “anak laki-laki” menjadi “anak laki-laki dan anak perempuan”. Penafsiran demikian diikuti oleh Mahkamah Agung yang tergambar dari beberapa yurisprudensi berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 86 K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995, dalam perkara antara H. Hikmah dkk melawan Nursaid dkk. Dalam putusannya, Mahkamah Agung berpendapat:

“Bahwa Mahkamah Agung berpendapat, selama masih ada anak baik laki-laki maupun perempuan maka hak waris dari orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris kecuali orang tua, suami dan isteri menjadi tertutup (terhijab)”

2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996, dalam perkara antara Waryem melawan H Mundiya dan Tin Winarsih. Dalam putusannya, Mahkamah Agung berpendapat:

“Bahwa dengan adanya anak perempuan dari pewaris terhijab oleh Tergugat Asal I oleh karenanya Penggugat-Penggugat asal tidak berhak atas harta warisan”

- Bahwa terhadap adanya perbedaan pendapat mengenai kedudukan anak perempuan dalam menghijab saudara kandung Pewaris, Para Pihak menegaskan di dalam persidangan bahwa mereka menghendaki atau setidaknya mengikuti pandangan **pertama** yang menganggap anak perempuan tidak menghijab saudara kandung. Para Pihak, khususnya Pemohon I dan Pemohon II, menyatakan keridhaannya saudara kandung Pewaris memperoleh bagian waris, terlebih Pemohon III dan Pemohon IV bukanlah dari golongan yang mampu;
- Bahwa selanjutnya, Pengadilan akan mempertimbangkan perihal siapa ahli waris yang sah dari Drs. Fakhrani sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Halaman 26 dari 32 halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah ternyata fakta di persidangan terungkap, ketika Drs. Fakhrani meninggal dunia, kerabat terdekat yang masih hidup adalah isteri (Pemohon I) dan dua orang anak kandungnya (Pemohon II dan Pemohon III) sementara kedua orang tua Drs. Fakhrani telah meninggal dunia terlebih dahulu. Demikian, pula kedua saudara kandung Drs. Fakhrani (Pemohon III dan Pemohon IV) masih hidup;
- Bahwa telah ternyata pula suatu fakta bahwa para kerabat yang meninggal dunia tersebut masih beragama Islam dan tidak pernah terindikasi melakukan suatu perbuatan yang dapat mengancam keselamatan jiwa Drs. Fakhrani dan/atau hal-hal lain yang dapat menyebabkan para kerabat tersebut terhalang untuk mendapat warisan;
- Bahwa terkait dengan adanya perbedaan pendapat mengenai kedudukan anak perempuan sebagaimana dipaparkan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa perbedaan tersebut merupakan implikasi normatif dari perbedaan tafsir atas kata *walad*. Pengadilan dalam hal ini mengambil pendapat yang mensintesis makna dari kedua pandangan tersebut. Kedudukan anak perempuan dalam menghijab saudara dari pewaris sejatinya didasarkan pada teori peran (*the theory of role*), yaitu sejauh mana atau sampai pada tingkatan mana peran seorang anak perempuan dan saudara kandung terhadap Pewaris yang meninggal dunia. Jika memperhatikan kembali peristiwa pengambilan harta waris oleh saudara-saudara dari Sa'ad bin al-Rabi'i yang kemudian Rasulullah SAW menetapkan bagian dua anak perempuan 2/3 bagian, isteri 1/8 bagian, dan sisanya untuk saudara dari Sa'ad bin al-Rabi'i, maka tampak bahwa peran penting dari para saudara Sa'ad bin al-Rabi'i menjadi sebab para saudara tersebut memperoleh bagian *ashabah*. Turunnya QS Al Nisa ayat 11 merupakan refleksi atas peran saudara Pewaris yang secara umum ada dan terjadi dalam dinamika kehidupan keluarga. Secara *a contrario* (*argumentum a contrario*) atau *mahfum mukhalafah*, dapat diinterpretasikan bahwa dalam konteks saudara-saudara Pewaris tidak memiliki kontribusi sama sekali terhadap kehidupan Pewaris terlebih saat-saat meninggalnya Pewaris para saudara mengabaikan kewajibannya mengurus Pewaris, hal

Halaman 27 dari 32 halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana justeru diperankan secara aktif oleh anak-anak perempuan Pewaris, maka anak perempuan, karena perannya tersebut – dan karena tidak dijalankannya tanggung jawab atau peran dari para saudara – memiliki kemampuan atau kedudukan menghalangi para saudara Pewaris;

- Bahwa dari hal ini, tampaklah bagaimana Hukum Islam menekankan aspek keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hukum Islam menempatkan peran dan andil seseorang terhadap orang lain sebagai sebab dia memperoleh hak atau kesenangan. Hak dan kewajiban yang seimbang pada akhirnya tergambar dari bagaimana ketentuan hukum waris, khususnya mengenai kedudukan anak perempuan tersebut di atas;
- Bahwa dari konstruksi perkara *a quo*, Para Pemohon, khususnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan keridhaannya dalam memilih pendapat pertama, hal mana dianggap sebagai pengakuan Pemohon I dan Pemohon II akan peran dan tanggung jawab yang telah dilaksanakan oleh Para Saudara Pewaris hingga Pewaris meninggal dunia. Bahwa terlepas dari hal tersebut, kesepakatan Para Pemohon dalam hal ini juga menunjukkan bahwa mereka menyadari hak dan kewajiban masing-masing sebagai ahli waris. Adanya kesepakatan di antara mereka juga diharapkan tetap dapat memupuk silaturahmi dan memberikan kesadaran lebih pada saudara-saudara pewaris untuk memikul tanggung jawab menjaga keselamatan anak-anak perempuan dari Pewaris;
- Bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa ahli waris yang sah dari Drs. Fakhrani adalah isteri, ketiga anak perempuan (Pemohon I dan II), serta dua orang saudara kandung (Pemohon III dan Pemohon IV) sebagaimana dalam diktum putusan berikut.

Petitum: Menetapkan Bagian dari masing-masing Ahli Waris dari Drs. Fakhrani

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 28 dari 32 halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengadilan dalam hal ini telah menetapkan ahli waris yang sah dari Drs. Fakhrani (Pewaris) adalah isteri dan ketiga anak perempuan (Pemohon I dan II), serta dua orang saudara kandung (Pemohon III dan Pemohon IV);
- Bahwa selanjutnya akan ditentukan bagian masing-masing ahli waris menurut ketentuan (penghitungan) dalam matriks berikut ini:

Ahli waris	Bagian waris	Penyamaan penyebut
Isteri (Pemohon I)	1/8	3/24
3 anak perempuan (Pemohon I dan Pemohon II)	2/3	16/24
2 saudara laki-laki kandung (Pemohon II dan Pemohon IV)	Ashabah (1- 19/24)	5/24

Dari tiga anak perempuan tersebut, masing-masing anak perempuan memperoleh $\frac{1}{3} \times \frac{16}{24} = \frac{16}{72}$ bagian. Adapun dua orang saudara kandung Pewaris, masing-masing saudara kandung memperoleh $\frac{1}{2} \times \frac{5}{24} = \frac{5}{48}$ bagian.

Dari penetapan tersebut, maka dapat ditetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut:

Ahli waris	Bagian waris	Penyamaan penyebut
Noer Ainiyah (Isteri)	3/24	18/144
Yasfi Shadriyah, S.Pd binti Drs.Fakhrani (anak perempuan kandung)	16/72	32/144
Shofia Qalby binti Drs.Fakhrani (anak perempuan kandung)	16/72	32/144
Syifa Shudurina binti Drs.Fakhrani (anak perempuan kandung)	16/72	32/144
M.Jayadi bin Abdurrahman (saudara laki-laki kandung)	5/48	15/144

Halaman 29 dari 32 halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Nur bin Abdurrahman (saudara laki-laki kandung)	5/48	15/144
Jumlah		144/144

- Bahwa perlu ditegaskan penetapan bagian waris tersebut adalah bagian waris dari *tirkah* (harta waris) Pewaris setelah dikurangi bagian harta bersama antara Pewaris dengan NOER AINIYAH (Isteri Pewaris). Harta waris Pewaris adalah harta yang murni merupakan miliknya. Dengan demikian, maka jika harta yang ditinggalkan Pewaris akan dibagi, maka terlebih dahulu harus dikeluarkan atau diberikan separuh (1/2) bagian untuk NOER AINIYAH selaku isteri Pewaris sebagai bagian yang bersangkutan atas harta bersama (kecuali terhadap harta Pewaris yang merupakan warisan atau hadiah sebelum dan saat menikah dengan NOER AINIYAH atau harta-harta yang diperjanjikan dalam perjanjian kawin/*huwelijke voorwaarden* sebagai harta pribadi Pewaris). Separuh (1/2) bagian sisanya adalah harta waris Pewaris (setelah dikurangi lagi dengan hutang dan/atau wasiat) merupakan *tirkah* atau harta waris yang dibagikan kepada para ahli waris sesuai dengan bagian yang telah ditentukan tersebut di atas.

Konklusi

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berkesimpulan Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan hukum, karena itu dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 R.Bg, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan *syara'* berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan almarhum **FAKHRANI Bin ABDURRAHMAN** meninggal dunia pada tanggal 14 April 2017 di Kota Banjarbaru;

Halaman 30 dari 32 halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris dari almarhum **FAKHRANI Bin ABDURRAHMAN** adalah sebagai berikut:
 - 3.1. **NOER AINIYAH Binti H. ZAINAL HAKIM** (Istri);
 - 3.2. **YASFI SHADRIYAH, S.Pd. Binti FAKHRANI** (anak perempuan kandung);
 - 3.3. **SHOFIA QOLBY Binti FAKHRANI** (anak perempuan kandung);
 - 3.4. **SYIFA SHUDURINA Binti FAKHRANI** (anak perempuan kandung);
 - 3.5. **M. JAYADI Bin ABDURRAHMAN** (saudara laki-laki kandung);
 - 3.6. **MUHAMMAD NUR Bin ABDURRAHMAN** (saudara laki-laki kandung).
4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum **FAKHRANI Bin ABDURRAHMAN** adalah sebagai berikut:
 - 4.1. **NOER AINIYAH Binti H. ZAINAL HAKIM** (Istri) mendapatkan **18/144** bagian;
 - 4.2. **YASFI SHADRIYAH, S.Pd. Binti FAKHRANI** (anak perempuan kandung) mendapatkan **32/144** bagian;
 - 4.3. **SHOFIA QOLBY Binti FAKHRANI** (anak perempuan kandung) mendapatkan **32/144** bagian;
 - 4.4. **SYIFA SHUDURINA Binti FAKHRANI** (anak perempuan kandung) mendapatkan **32/144** bagian;
 - 4.5. **M. JAYADI Bin ABDURRAHMAN** (saudara laki-laki kandung) mendapatkan **15/144** bagian;
 - 4.6. **MUHAMMAD NUR Bin ABDURRAHMAN** (saudara laki-laki kandung) mendapatkan **15/144** bagian.
5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1438 Hijriyah oleh **MOHD. ANTON DWI PUTRA, SH., MH.** Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru sebagai Ketua Majelis Hakim, **H. EDI HUDIATA, Lc., MH.** dan **M. NATSIR ASNAWI, SHI., MH.** masing-masing sebagai Hakim

Halaman 31 dari 32 halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **Hj. WAHIBAH, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis

MOHD. ANTON DWI PUTRA, SH., MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

H. EDI HUDIATA, Lc., MH.

M. NATSIR ASNAWI, SHI., MH.

Panitera Pengganti

Hj. WAHIBAH, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran Tk. I | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan Para Pemohon | : Rp. 360.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah	: Rp. 451.000,00
	(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 32 dari 32 halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)